

SKRIPSI

**MITIGASI BENCANA BERBASIS PENGETAHUAN LOKAL
MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan Diajukan Oleh:

Gunawan

10564 11042 17



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

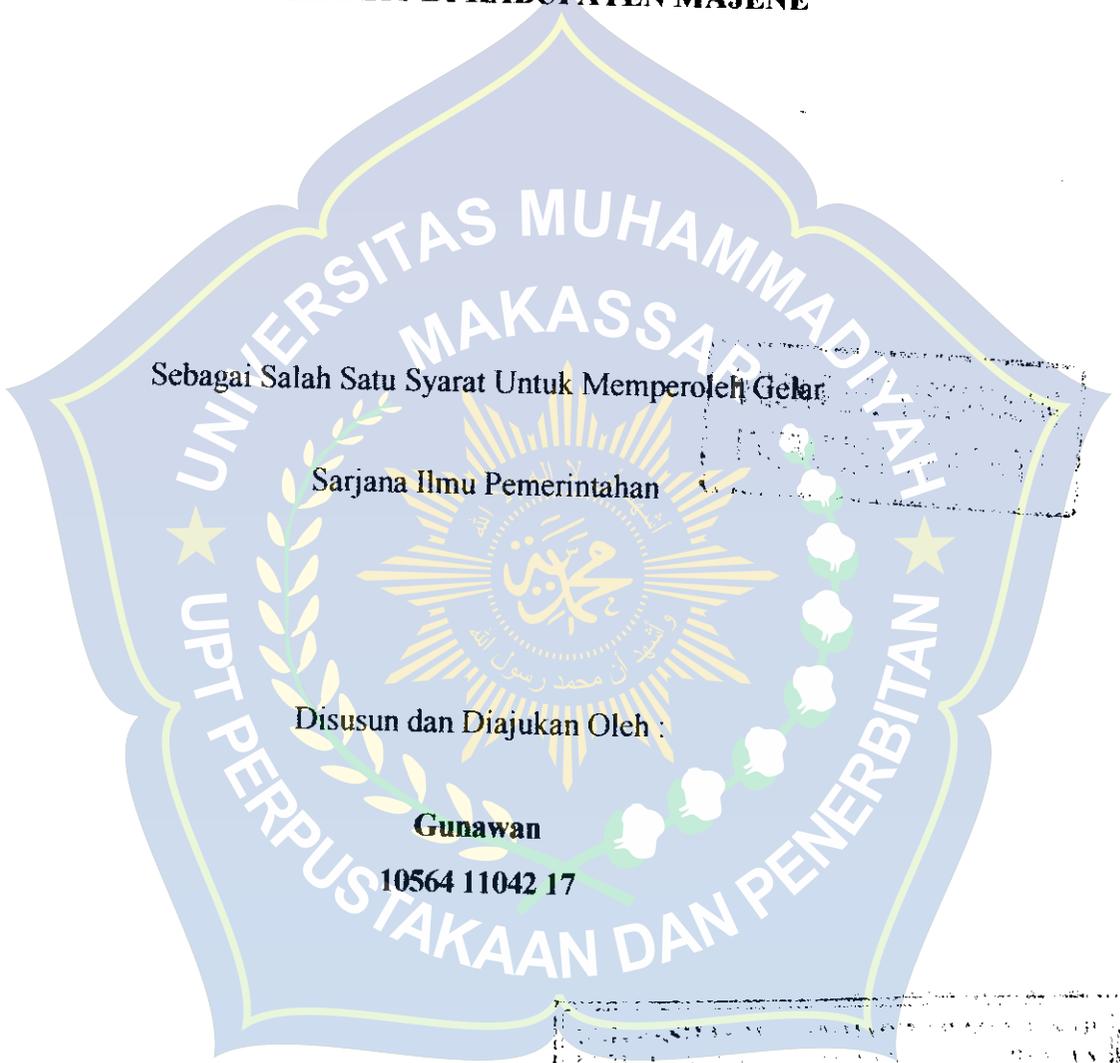
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

SKRIPSI

**MITIGASI BENCANA BERBASIS PENGETAHUAN LOKAL
MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJENE**



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh :

Gunawan

10564 11042 17

No. Pengantar	26/08/2022
No. Buletin	—
No. Surat	1 org
Nama	Smb. Alumni
No. NIM	R/0096/1pm/22 cp
	GUN
	m ¹

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal
Masyarakat Di Kabupaten Majene

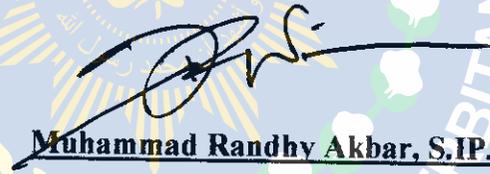
Nama Mahasiswa : Gunawan

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11042 17

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,
Pembimbing I Pembimbing II

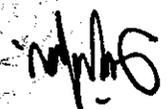

Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

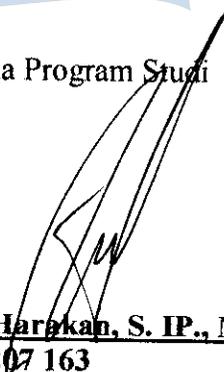

Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihvani Malik, S. Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S. IP., M.H.I
NBM. 1207 163

HALAMAN TIM PENILAI

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekam Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 059/FSP/A.4-II/VIII/44/2022 Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari jum'at 05 Agustus 2022.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NMB : 730727

Sekretaris



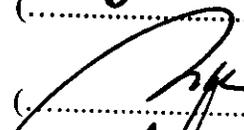
A. LUHUR PRIANTO S.IP, M.Si
NMB : 992797

PENGUJI

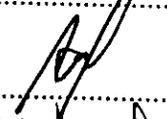
1. Dr. Amir Muhiddin, M.Si (Ketua)


(.....)

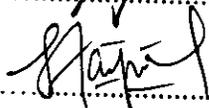
2. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si


(.....)

3. Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I


(.....)

4. Hamrun, S.IP., M.Si


(.....)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan
Nomor Induk Mahasiswa : 105641104217
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Proposal Penelitian dengan judul “*Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene*” adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 18 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Gunawan

ABSTRACT

Gunawan (2022), Rudi Hardi Dan Muhammad Randi Akbar*Disaster Mitigations Based on Community Local Wisdom In Majene District*

A disaster is an event that results in a tremendous impact on the human population. In Law no. 24 of 2007 explains that a disaster is an event or series of events that threatens and disrupts people's lives and livelihoods caused by both natural and or non-natural factors as well as human factors, resulting in human casualties, environmental damage, property losses and psychological impacts. Disaster Mitigation based on local knowledge in Majene Regency with a theoretical approach (Dekens in Susilo & Arrozy, 2020) namely community anticipation, resources, and the ability to observe the environment. This study uses a qualitative research type with descriptive research type, the informants in this study amounted to 6 people, while the data collection techniques in this study used observation techniques, interview techniques, and documentation techniques, data analysis techniques in this study were data reduction, data presentation, Conclusion, Data analysis technique of source triangulation, technique triangulation and time triangulation. The purpose of this study is to find out how disaster mitigation is based on local knowledge of the community in Majene Regency. Disaster Mitigations Based on Community Local Wisdom In Majene District

Research results in this study Community anticipation in disaster mitigation has been carried out with various stakeholders. This is evidenced by the existence of cooperation between the parties involved in disaster anticipation. Resources to support disaster mitigation in Majene Regency are ideal, but there needs to be socialization to the community or related parties about disaster mitigation as an effort to expand local knowledge such as pre-disaster, during disaster. and post-disaster, the ability to observe and read the disaster mitigation environment in Majene Regency, especially in Ulumanda District, has been carried out since ancient times, various related parties such as traditional stakeholders, government and community leaders believe in this. evidenced by the existence of local wisdom from ancestors who believed and were able to read the order of life as a community philosophy called the tuho custom and signs of natural disasters that would occur in the region.

Keywords:*Disaster Mitigation, Local Knowledge*

ABSTRAK

Gunawan (2022), Rudi Hardi Dan Muhammad Randi Akbar*Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Di Kabupaten Majene.*

Bencana adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi populasi manusia. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Mitigasi Bencana berbasis pengetahuan lokal di Kabupaten Majene dengan pendekatan teori (Dekens dalam Susilo & Arrozy, 2020) yakni antisipasi komunitas, sumber daya, serta kemampuan mengamati lingkungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, Informan pada Penelitian ini berjumlah 6 orang, adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik Dokumentasi, teknik analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, Kesimpulan, Teknik analisis data triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan triangulasi waktu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene

Hasil Penelitian pada penelitian ini Antisipasi komunitas dalam mitigasi bencana sudah dilakukan dengan berbagai *stacholder*. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerja sama antara pihak yang terkait dalam antisipasi bencana, Sumber daya dalam mendukung mitigasi bencana di Kabupaten Majene, hal itu bisa di tinjau dari sinergitas yang baik antar elemen. Kemudian masyarakat Ulumanda pada khususnya melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir ketika terjadi bencana di antaranya yang menjadi modal utama ialah terbangunnya hubungan emisional yang baik sehingga itu yang menjadi spirit bagi masyarakat baik itu dalam tatanan sosial maupun dalam menangani terjadinya bencana hal ini tentu dia atur oleh adat istiadat yang masyarakat lokal menyebutnya Adat Tuho. Hal ini sudah beransur lama dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, hal ini dapat dilihat dari kejadian bencana kurang lebih satu tahun lalu antusias dan rasa kemanusiaan masyarakat amatlah kuat dan ini yang menjadi kekuatan prima bagi masyarakat Kabupaten Majene khususnya di Kecamatan Ulumanda telah dilakukan sejak jaman dulu, berbagai pihak terkait seperti pemangku adat, pemerintah dan tokoh masyarakat mempercayai hal tersebut. Hal lain yang di lakukan adalah menyediakan lahan sebagai hunian sementara ketika terjadi benca selain itu masyarakat juga memai kontruksi bangunan rumah yang sifatnya non permanen yang terbuat dari kayu atau yang di kenal rumah panggung, dibuktikan dengan adanya kearifan lokal dari nenek moyang yang percaya dan mampu membaca tatanan kehidupan sebagai falsafah masyarakat yang disebut adat tuho serta tanda-tanda bencana alam yang akan terjadi di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Mitigasi Bencana, Pengetahuan Lokal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Tiada kata terindah yang patut diucapkan oleh peneliti selain puji syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hamba-Nya, sehingga dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini sebagai bukti atas perjuangan yang panjang dan jawaban atas doa yang senantiasa mengalir dari orang-orang terdekat. Dan tak lupa pula penulis panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan besar umat islam sekaligus pemimpin bagi keseluruhan umat manusia yakni baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa yang penuh kesuraman menuju masa yang penuh harapan seperti sekarang ini.

Adapun skripsi ini dengan judul “Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat Di Kabupaten Majene” disusun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses penyusunan skripsi ini berjalan tidak mudah. Ada banyak rintangan, hambatan, dan cobaan dalam prosesnya. Namun berkat ketekunan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga dengan adanya bantuan dari berbagai

pihak, baik berupa bantuan moril maupun bantuan materil sehingga mempermudah penyelesaian penulisan skripsi ini.

Secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda H. Getok dan Ibunda Hj.Suryani yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya demi kesuksesan putra-putrinya, juga yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ahmad Harakan S.IP., M.H.I selaku Dosen Penasehat Akademik bagi penulis selama ±4 tahun menapaki jenjang pendidikan dibangku kuliah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ahmad Taufik, S.IP.,M.AP selaku penasehat akademik yang selalu memberikan arahan berkaitan dengan akademik
5. Bapak Rudi Hardi, S.Sos.,M.SI dan Muhammad Randi Akbar, S.IP.,M.SI selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

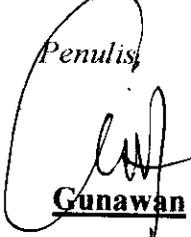
6. Para Dosen beserta jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak Gunawan selaku sekretaris BPBD Kabupate Majene yang siapjadi informan dan banyak memberi informasi sekaligus memberikan data-data yang telah di perlukan sipenulis.
8. Bapak Muh Arif selaku camat Ulumanda, Ayahanda Ir. Basri Ibrahim selaku Ketua Forum Studi Pengembangan Ada'Tuho, Bapak Asrul sebagai kabid kesiapsiagaan BPBD Majene, Bapak H. Ibrahim selaku toko masyarat dan Bapak bandu selaku masyarat, yang telah memberikan informasi yang telah di perlukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Satriani Dan Alanbudi selaku saudari dan saudara kandung yang telah memberikan banyak motivasi dan do,a kepada penulis

Teriring doa semoga Allah SWT menjadikan semua pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia maupun di akhirat kelak, *Amiin*.
Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Billahi Fii Sabilhaq Fastabiqul Khaerat

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 28 Juni 2021

Penulis

Gunawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	12
C. Kerangka Berpikir.....	28
D. Fokus Penelitian.....	29
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi.....	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	31
C. Informan.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Teknik Pengabsahan Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	37
1. Gambaran Umum Kabupaten Majene.....	37

2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene	40
B. Hasil Penelitian Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene.....	62
C. Pembahasan Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene.....	75
BAB VPENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak yang luar biasa bagi populasi manusia. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (Djauhari, 2014).

Bencana dibagi menjadi tiga yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial (Erita et al., 2019). Menurut Erita et al (2019) bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam yaitu diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana non-alam termasuk terorisme biologi dan biokimia, tumpahan bahan kimia, radiasi nuklir, kebakaran, ledakan, kecelakaan transportasi, konflik bersenjata, dan tindakan perang. Bencana sosial merupakan bencana karena peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau

antarkomunitas (Erita et al., 2019). Setiap daerah memiliki titik atau tempat yang rawan bencana. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu (Suwarno, 2019). Dalam UU RI NO. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 yaitu kawasan rawan bencana longsor adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya yang meliputi zona berpotensi longsor (PMPU No. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor).

Maka dari dibutuhkan suatu langkah untuk meminimalisir dampak dari bencana atau biasa disebut dengan mitigasi bencana. Salah satu penyebab peningkatan bencana di suatu daerah yaitu semakin tinggi diakibatkan adanya pertambahan jumlah penduduk yang sangat besar. Menurut Coburn et al (1994) mitigasi berarti mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh- pengaruh dari satu bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Istilah mitigasi berlaku untuk cakupan yang luas dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang mungkin diawali, dari yang fisik, seperti membangun bangunan-bangunan yang lebih kuat, sampai dengan yang prosedural, seperti teknik-teknik yang baku untuk menggabungkan penilaian bahaya di dalam rencana penggunaan lahan.

Menurut Widayatun & Fatoni dalam Hartono et al., (2021) mitigasi bencana adalah pengurangan risiko bencana di luar kemampuan masyarakat, (Akhirianto, 2019), karena ancaman dan bahaya hanya menjadi bencana jika berdampak pada masyarakat yang rentan. Sedangkan dalam UU No 24 Tahun 2007 secara umum, mitigasi bencana diartikan sebagai sebuah upaya perencanaan yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif bencana terhadap manusia.

Untuk melakukan mitigasi bencana peran masyarakat terutama dalam hal pengetahuan lokal masyarakat sangat diperlukan. Menurut Suparmini et al., (2014) dalam keseharian, terdapat berbagai pandangan dan pendapat tentang bencana yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pandangan dan pendapat tersebut sesuai dengan tingkat pendidikan dan pemahaman personal atau kelompok tentang bencana. Banyak definisi menurut para ahli tentang pengetahuan lokal seperti menurut Rahman et al., (2020) pengetahuan lokal dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan saat menghadapi situasi tertentu serta ditransmisikan lintas generasi melalui saluran tradisional.

Menurut Rahman et al., (2020) beberapa karakter atau ciri pengetahuan lokal yaitu kultural, terinternalisasi secara kuat, terkait dengan relasi antara manusia dengan lingkungan, terwariskan secara turun temurun, dan berperan penting dalam pengambilan keputusan di level kolektif.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk meminimalisir bencana, bencana yang terjadi baik bencana nonalam maupun bencana alam.

Khususnya bagi masyarakat lokal dalam mitigasi bencana yang berbasis pengetahuan lokal dengan cara tradisional juga sangat diperlukan jika terjadi bencana di daerah tersebut

Masyarakat lokal di Kabupaten Majene sangat memegang teguh prinsip hidup yang dinamakan Ada' Tuho dalam kehidupan sehari-hari dan menyatu dengan alam disekelilingnya yang kemudian dalam mengambil keputusan harus dengan musyawarah bersama dan menuakan pemangku adat Masyarakat Majene. Namun dewasa ini pada kenyataannya bencana yang terjadi di daerah Kabupaten Majene tetap melanda masyarakat khususnya didaerah pesisir pantai yang ada di Majene yang disebabkan dengan kehidupan pada zaman sekarang dengan semakin berkembangnya pengaruh teknologi moderen.

Mitigasi bencana berbasis pengetahuan lokal masyarakat harus diterapkan di Kabupaten Majene. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene menjelaskan bahwa wilayah Kabupaten Majene memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan. Kabupaten Majene terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana,

Tammerodo, Tubo Sendana, Malunda, dan Ulumanda yang letak geografisnya Kabupaten Majene berbatasan dengan Kabupaten Mamuju di sebelah utara dan Kabupaten Polewali Mandar sebelah timur, Batas sebelah selatan dan barat masing-masing Teluk Mandar dan Selat Makassar. Hasil penelusuran penulis bahwa Kabupaten Majene di Sulawesi Barat, merupakan daerah dengan resiko bencana tertinggi di Indonesia.

Dalam Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020 ini berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/ kota dan tingkat provinsi seluruh Indonesia. Hasil perhitungan indeks risiko bencana tahun 2020 menunjukkan 19 provinsi berada pada kelas risiko bencana tinggi dan 15 provinsi berada pada kelas risiko bencana sedang dan tidak ada provinsi yang berada pada risiko bencana rendah. Tiga provinsi yang berisiko paling tinggi yaitu Sulawesi Barat (skor 166,49), Bengkulu (skor 162,00), dan Kepulauan Bangka Belitung (skor 161,54).

Dari 514 Kabupaten kabupaten/ kota di Indonesia terdapat 237 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi dan 277 yang berada pada kelas indeks risiko sedang. Tiga kabupaten/ kota dengan skor yang paling tinggi adalah salah satunya yaitu Kabupaten Majene - Provinsi Sulawesi Barat (skor 216,08)(Wiguna et al., 2020). Berikut tabel indeks risiko Kabupaten Majene dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020.

Tabel 1
Indeks risiko Kabupaten Majene dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020

No	Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kelas Risiko 2020
1	Kabupaten Majene	221.20	221.20	221.20	216.08	216.08	216.08	Tinggi

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020

Untuk melihat lebih jelas tentang risiko bencana yang ada di kabupaten Majene, berikut dipaparkan dalam tabel.

Tabel 2
Indeks Risiko Per Ancaman Tahun 2020

No	Nama Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	36.00	Tinggi
2	Gempa Bumi	32.40	Tinggi
3	Tsunami	19.20	Tinggi
4	Kebakaran Hutan dan Lahan	36.00	Tinggi
5	Tanah Longsor	24.00	Tinggi
6	Gelombang ekstrim dan abrasi	24.00	Tinggi
7	Kekeringan	36.00	Tinggi
8	Cuaca Ekstrim	13.60	Tinggi

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020

Hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa belum efektifnya Rencana Penganggulangan Bencana Kabupaten Majene, sementara diketahui bencana terus terjadi dan silih berganti yang butuh penanganan yang intensif dari pemerintah kabupaten Majene. Segala bencana yang terjadi di Kabupaten Majene adalah tanggung jawab pemerintah kabupten majene untuk membangun kembali daerah yang terkena bencana. Sehingga perlu pelibatan antara pemerintah, swasta maupun masyarakat. Pembuatan Rencana Penganggulangan Bencana Kabupaten Majene juga belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, padahal dengan pelibatan masyarakat dapat memebrikan informasi tambahan yang tidak dimiliki oleh pemerintah.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene.**

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bertambahnya khazanah ilmu pengetahuan tentang mitigasi bencana yang berbasis pengetahuan local
 - b. Sebagai masukan pengembangan teori mitigasi bencana menyangkut Geografi Sumber Daya, dan Konservasi terhadap lingkungan.
 - c. Sebagai pembanding model pengurangan resiko bencana yang berbasis pengetahuan local masyarakat Majene.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat Kabupaten Majene, sebagai bahan dan acuan sekaligus dijadikan bahan referensi dalam tindakan mitigasi bencana.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai penentu sikap kebijakan untuk meminimalisir resiko bencana dan mengayomi masyarakat yang berada dikawasan rawan bencana

c. Bagi Peneliti

Sebagai penambah wawasan terkait mitigasi bencana yang berbasis pengetahuan lokal

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis sebagai berikut.

1. Samson et al., (2021) melakukan penelitian tentang Pengetahuan Lokal dan Strategi Lokal Sunda dalam Hadapi Bencana yang kesimpulannya yaitu Mitigasi bencana, bukan sekedar persiapan dan respons yang cepat dalam tanggap darurat, baik dalam: pra-bencana, sedang dan pasca-bencana. Bukan pula penelitian- penelitian kebencanaan yang semakin modern dan mutakhir atau ketersediaan alat-alat canggih dalam penanganannya, melainkan bagaimana kita mampu empati atau peka terhadap apa yang sudah nenek moyang lakukan dalam menjaga kelangsungan hidup kita dari masa ke masa, dari berbagai ancaman bencana selama beratus bahkan beribu abad lamanya. Tidak mungkin mereka tidak melakukan upaya seperti apa yang dilakukan manusia hari ini, untuk mengupayakan generasinya terus berlanjut. Mengenali jati diri adalah kuncinya, bagaimana kita bisa mengetahui dan respect terhadap apa yang sudah dikerjakan para nenek moyang. Perlu perspektif lain dalam kegiatan mitigasi bencana ini. 1) Pengetahuan lokal tentang mitigasi bencana yang diwariskan nenek moyang, sepatutnya kita dayagunakan di tanah air kita sendiri. Karena adat akan lebih tahun kampungnya, dibanding pihak lain yang datang

selewat. 2) Ketaatan berlandaskan Adat, Agama dan Negara sepatutnya di wujudkan dengan Tindakan nyata. Bukankah pepatah bilang “dimana bumi dipijak disana langit dijunjung” dan orang Sunda bilang “bumi boga ciri désa boga cara”. Cara adat dalam mitigasi bencana tidak perlu lagi diragukan. Bukankah keharmonisan manusia dengan semesta alam dicontohkan leluhur kita. Hidup harmonis dengan alam adalah ciri bangsa Indonesia.

2. Dian Agustina et al., (2020) dengan judul penelitian Pendampingan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Pengetahuan Lokal pada Masyarakat Rentan Bencana di Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Hasil penelitiannya yaitumasyarakat Kecamatan Air Rami memperoleh peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang mitigasi gempa bumi dan tsunami. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme stakeholder dan masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini didukung pula dari uji staistik Wilcoxon, bahwa sosialisasi meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pemahaman mitigasi bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami. Program pengabdian ini diharapkan dapat dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir Provinsi Bengkulu.

3. Susilo & Arrozy (2020) dengan penelitiannya yaitu Pengetahuan Lokal sebagai Reaksi Komunitas dalam Manajemen Bencana (Studi Etnografi Warga Brau, Batu, Indonesia). Adapun hasil penelitian yaitu bahwa pengetahuan lokal itu berkontribusi positif baik dalam tanggap darurat maupun penanggulangan bencana, seperti gotong-royong yang merupakan modal sosial efektif dalam pemulihan kondisi pasca bencana. Eksistensi pengetahuan lokal itu bervariasi, tidak semua pengetahuan lokal mendukung mitigasi bencana, ada pula pengetahuan yang tidak mendukung penanggulangan bencana, seperti kepercayaan-kepercayaan adat yang menutup diri atas ancaman bahaya dan menghalangi evakuasi ke tempat yang lebih aman. Aktualisasi pengetahuan lokal terkadang berdampak pada pengabaian komunitas lokal terhadap kegiatan-kegiatan antisipasi dalam menghadapi bencana. Maka dari itu, sudah saatnya proses pengelolaan antisipasi dan pasca bencana berbasis pengurangan resiko dengan melibatkan masyarakat lokal (*local people engagement*) dijadikan sebagai paradigma *stake holder* hari ini dan benar-benar diperhatikan realisasinya. Kajian ini menarik elemen subjektif beserta elemen objektif yang menimbulkan sintesa pengetahuan baru sehingga mampu mengatasi kekhawatiran masyarakat terhadap ancaman bencana alam. Elemen subjektif berupa pemaknaan kultural yang dibagikan dan dihayati bersama (*shared cultural meanings*), lalu teks budaya berupa kultur persaudaraan sehingga terjadi aksi saling

mengingatkan dalam melakukan reaksi terhadap bencana, dan aksi simbolik merupakan fakta mental yang berperan dalam langgam pengetahuan supaya menjadi refleksi kultural. Elemen objektif berupa efek atau social impact sehingga warga kampung atau penduduk telah terselamatkan dari bencana alam baik dari kriteria fisik, kejiwaan maupun rohani. Pengetahuan lokal juga berkontribusi mendorong warganya mendapatkan praktik terbaik (*best practice*) antisipasi bencana kerentanan lingkungan.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Bencana

Kita sering mendengar dari televisi atau radio berita mengenai bencana yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia atau luar negeri. Berita tentang bencana selalu terkait dengan musibah atau hal yang menyedihkan. Sekarang mari kita mencoba memahami pengertian dari bencana. Pengertian bencana dapat ditemukan dari berbagai sumber, sebagai berikut. Definisi bencana menurut UN-ISDR tahun 2004 dalam Erita et al., 2019) menyebutkan bahwa bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri.

Bencana sering kali merupakan akibat dari kombinasi faktor-faktor

yang terjadi secara bersama: sumber api, daerah pemukiman yang padat dan rumah-rumah yang mudah terbakar sebagai contoh, atau pecahnya daerah retakan gempa yang dekat dengan satu kota yang terbentuk dari bangunan- bangunan yang lemah dan berpenduduk padat. Faktor-faktor penyumbang bencana-bencana di masa lampau dapat diidentifikasi untuk menandai kondisi-kondisi yang sama di tempat lain. Inilah proses dari analisa resiko (Coburn et al., 1994).

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam WHO – ICN (2009) bencana adalah sebuah peristiwa, bencana yang tiba-tiba serius mengganggu fungsi dari suatu komunitas atau masyarakat dan menyebabkan manusia, material, dan kerugian ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Meskipun sering disebabkan oleh alam, bencana dapat pula berasal dari manusia (Erita et al., 2019).

Bencana adalah suatu keadaan yang tiba-tiba mengancam kehidupan masyarakat karena faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasinya sendiri (Erita et al., 2019).

Setiap bahaya memerlukan pemahaman tentang: - penyebab-penyebabnya - penyebaran geografisnya, ukuran atau keparahan, dan kemungkinan frekuensi kemunculannya (Coburn et al., 1994)

- a. Mekanisme kerusakan fisik
- b. Elemen-elemen dan aktivitas-aktivitas yang paling rentan terhadap kerusakan
- c. Kemungkinan konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekonomi dari bencana

2. Macam-macam Bencana

Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 1 menjelaskan bahwa bencana dibedakan menjadi: 1) bencana alam; 2) bencana non alam; dan 3) bencana sosial. Berikut penjelasannya.

a. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,

angin topan, dan tanah longsor. Di bawah ini akan diperlihatkan gambar tentang bencana alam yang telah terjadi di Indonesia.

b. Bencana non-Alam

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana non-alam termasuk terorisme biologi dan biokimia, tumpahan bahan kimia, radiasi nuklir, kebakaran, ledakan, kecelakaan transportasi, konflik bersenjata, dan tindakan perang. Sebagai contoh gambar 3 adalah gambaran bencana karena kegagalan teknologi di Jepang, yaitu ledakan reaktor nuklir.

c. Bencana Sosial

Bencana karena peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas. Misalnya konflik sosial antar suku dan agama.

Berdasarkan sumber dan penyebabnya, bencana dapat dikelompokkan menjadi: (a) Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti: banjir, tanah longsor gempabumi, erupsi gunungapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami. (b) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (c) Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror (Suparmini et al., 2014).

3. Mitigasi Bencana

Mitigasi berarti mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh- pengaruh dari satu bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Istilah mitigasi berlaku untuk cakupan yang luas dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang mungkin diawali, dari yang fisik, seperti membangun bangunan-bangunan yang lebih kuat, sampai dengan yang prosedural, seperti teknik-teknik yang baku untuk menggabungkan penilaian bahaya di dalam rencana penggunaan lahan (Coburn et al., 1994).

Mitigasi mencakup tidak hanya menyelamatkan hidup dan mereka yang terluka dan mengurangi kerugian-kerugian harta benda, akan tetapi juga mengurangi konsekuensi-konsekuensi yang saling merugikan dari bahaya-bahaya alam terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi dan institusi-institusi sosial (Coburn et al., 1994). Tahap pertama dan penting yang penting dalam setiap strategi mitigasi adalah memahami sifat bahaya-bahaya yang mungkin akan dihadapi (Coburn et al., 1994).

Perencanaan mitigasi harus bertujuan untuk mengembangkan suatu kultur keselamatan di mana semua anggota masyarakat sadar akan bahaya-bahaya yang mereka hadapi, mengetahui bagaimana melindungi diri mereka, dan akan mendukung upaya-upaya perlindungan dari orang-orang lain dan masyarakat secara keseluruhan (Coburn et al., 1994).

Secara umum, mitigasi bencana diartikan sebagai sebuah upaya perencanaan yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif bencana terhadap manusia. Mitigasi bencana merupakan salah satu dari kegiatan manajemen bencana, yang meliputi: (1) kegiatan prabencana, yakni kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini; (2) kegiatan saat terjadi bencana, meliputi kegiatan tanggap darurat, kegiatan SAR (*search and rescue*), bantuan darurat, dan pengungsian, serta (3) kegiatan pascabencana yang mencakup kegiatan pemilihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi (UU No 24 Tahun 2007).

Mitigasi bencana, bukan sekedar persiapan dan respons yang cepat dalam tanggap darurat, baik dalam: pra-bencana, sedang dan pasca-bencana. Bukan pula penelitian- penelitian kebencanaan yang semakin modern dan mutakhir atau ketersediaan alat-alat canggih dalam penanganannya, melainkan bagaimana kita mampu empati atau peka terhadap apa yang sudah nenek moyang lakukan dalam menjaga kelangsungan hidup kita dari masa ke masa, dari berbagai ancaman bencana selama beratus bahkan beribu abad lamanya. Tidak mungkin



mereka tidak melakukan upaya seperti apa yang dilakukan manusia hari ini, untuk mengupayakan generasinya terus berlanjut (Samson et al., 2021). Mengenali jati diri adalah kuncinya, bagaimana kita bisa mengetahui dan respect terhadap apa yang sudah dikerjakan para nenek moyang. Perlu perspektif lain dalam kegiatan mitigasi bencana ini. 1) Pengetahuan lokal tentang mitigasi bencana yang diwariskan nenek moyang, sepatutnya kita dayagunakan di tanah air kita sendiri. Karena adat akan lebih tahun kampungnya, dibanding pihak lain yang datang selewat. 2) Ketaatan berlandaskan Adat, Agama dan Negara sepatutnya di wujudkan dengan Tindakan nyata. Bukankah pepatah bilang “dimana bumi dipijak disana langit dijunjung” dan orang Sunda bilang “bumi boga ciri désa boga cara”. Cara adat dalam mitigasi bencana tidak perlu lagi diragukan. Bukankah keharmonisan manusia dengan semesta alam dicontohkan leluhur kita. Hidup harmonis dengan alam adalah ciri bangsa Indonesia (Samson et al., 2021).

Menurut Khrisna S. Pribadi dalam Dewi (2014) menjelaskan tindakan mitigasi terdiri dari mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural adalah tindakan untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan dampak bencana secara fisik. Sedangkan mitigasi non struktural adalah tindakan untuk mengurangi risiko bencana melalui kebijakan, pengembangan pengetahuan, peraturan dan pengamanan benda berbahaya.

Carter dalam Erita et al., (2019) kejadian bencana terhadap kehidupan dengan cara-cara alternatif yang lebih dapat diterima secara ekologi. Smith dalam Erita et al., 2019 kegiatan-kegiatan mitigasi termasuk tindakan-tindakan nonrekayasa seperti upaya-upaya peraturan dan pengaturan, pemberian sanksi dan penghargaan untuk mendorong perilaku yang lebih tepat, dan upaya-upaya penyuluhan dan penyediaan informasi untuk memungkinkan orang mengambil keputusan yang berkesadaran. Upaya-upaya rekayasa termasuk pananaman modal untuk bangunan struktur tahan ancaman bencana dan/atau perbaikan struktur yang sudah ada supaya lebih tahan ancaman bencana.

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (Suparmini et al., 2014).

Tujuan dari penanggulangan bencana adalah (Suparmini et al., 2014).

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. Pengertian Pengetahuan Lokal

Banyak pengertian pengetahuan lokal definisi tersebut memperlihatkan jika pengetahuan dan praktik lokal merupakan akumulasi dari interaksi jangka panjang antara masyarakat dengan berbagai situasi yang terjadi di lingkungan di mana mereka tumbuh. Pengetahuan tersebut dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan saat menghadapi situasi tertentu serta ditransmisikan lintas generasi melalui saluran tradisional (Susilo & Arrozy, 2020).

Tabel 3
Definisi Pengetahuan Lokal

No	Tokoh	Pengertian Pengetahuan Lokal
1	Berkes (1993)	Pengetahuan dan kepercayaan (<i>belief system</i>) yang terakumulasi dalam sebuah masyarakat, di mana pengetahuan dan kepercayaan tersebut ditransmisikan melalui budaya, tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan lingkungan di mana mereka tumbuh dan berinteraksi.
2	Gadgil dkk. (1993)	Pengetahuan yang tumbuh di dalam masyarakat, yang bersifat Lokal dari generasi ke generasi, dibentuk melalui berbagai pengalaman <i>trial and error</i>
3	Warren dkk. (1995)	Basis pengetahuan masyarakat dalam mengelola informasi sehingga membantu masyarakat tersebut dalam berkomunikasi, serta mengambil keputusan dan tindakan terhadap masalah yang mereka hadapi.

4	Grenier (1998)	Pengetahuan lokal yang tradisional dan unik, yang tumbuh dan berkembang dalam situasi tertentu.
---	----------------	---

Sumber : Book Series Manajemen Bencana Pengetahuan dan Praktik Lokal untuk Pengurangan Risiko Bencana: Konsep dan Aplikasi, 2021

Pengetahuan lokal menurut Dekens dalam Susilo & Arrozy, (2020) tentang kewaspadaan bencana berhubungan erat dengan antisipasi komunitas setempat terhadap situasi yang berbahaya dari dampak alam. Antisipasi komunitas lokal ini bersandar kepada keberadaan sumber daya untuk mata pencaharian dan kemampuan mengamati serta membaca lingkungan. Dengan kata lain, pengetahuan lokal dapat dipahami dengan melakukan identifikasi cara-cara setempat menafsirkan dan memantau peringatan dini di lingkungan setempat (Dekens, 2007). Indikasi banjir misalnya, diketahui dengan penandaan warna awan, lokasi, intensitas dan frekuensi curah hujan, bunyi suara yang tidak lazim, perubahan kondisi aliran air, warna air, arah angin, dan tumbuh-tumbuhan. Disamping itu, indikasi banjir juga sering teramati dari perilaku tidak normal dari satwa liar seperti ular, tikus, burung, dan rombongan semut.

Menurut Thrupp dalam Susilo & Arrozy, (2020) para pakar ilmu sosial menjelaskan bahwa pengetahuan lokal merupakan proses dinamis dan selalu berubah setiap waktu melalui eksperimentasi dan adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan sosial-ekonomi.

Menurut Battista dalam Susilo & Arrozy, (2020) pendekatan partisipasi merupakan manajemen bencana dan upaya preparing

berbasis pra-kondisi kesiapan antara pengetahuan lokal dengan praktik komunitas terhadap bencana. Reaksi komunitas terhadap bencana berdasarkan. Akumulasi empiris dan susunan pengetahuan local.

Pengetahuan lokal menjadi konsep perhatian ilmu sosial. Clifford Geertz dalam Susilo & Arrozy, (2020) memberikan catatan etnologi bahwa pengetahuan lokal berasal dari deskripsi tebal (*thick description*) tentang konsep perilaku sosial namun yang termaktub dalam sejarah sosial terutama imajinasi moral. Geertz mempunyai inspirasi sejarah sosial yang berasal dari Johann Huizinga tentang strategi kebudayaan. Temuan Geertz dalam Susilo & Arrozy, (2020) mengenai pengetahuan lokal disusun melalui sintesa "*theater state*" dengan tradisi pemikiran sosial Peter Burke (2015). Geertz menerangkan bagaimana kelompok kekerabatan (*kin*), adat istiadat (*customary law*), komunitas dagang dan aliran air sungai mampu melakukan kontrol terhadap mitos, arsitektur, ikonografi, teknik kremasi, begitu pula konsepsi politik seperti otoritas, kuasa (*power*) dan status (Susilo & Arrozy, 2020). Sudut pandang dari penduduk asli menjadi pokok pandangan (*native point of view*) dalam proses rasionalitas lokal sistem budaya (*common sense as a cultural system*).

Laxman Joshi dalam Susilo & Arrozy, (2020) konsep pengetahuan lokal bersifat dinamis dalam pemaknaan selalu berkembang sebagaimana perkawinan alamiah atau beragam pengetahuan dari sumber empiris. Hal ini membentuk suatu pola belajar dan bekerja,

belajar sebagai upaya menghadapi kendala sedangkan bekerja sebagai suatu usaha melahirkan produk untuk komunitas berkelanjutan. Output dari pembelajaran tersebut, melahirkan alasan dan persepsi kepada basis prediksi terhadap peristiwa yang akan tiba, sedangkan komunitas akan mengerti dengan menafsirkan melalui penjelasan nalar yang bekerja dalam akar rumput (*work for grounded*) sehingga secara tidak langsung menimbulkan validasi secara umum dan komunal (Susilo & Arrozy, 2020).

5. Karakteristik Pengetahuan Lokal

Dari beberapa definisi di atas, kita dapat mengidentifikasi beberapa karakter atau ciri pengetahuan lokal, yaitu kultural, terinternalisasi secara kuaz, terkait dengan relasi antara manusia dengan lingkungan, terwariskan secara turun temurun, dan berperan penting dalam pengambilan keputusan Ali level kolektit (Rahman et al., 2020).

Pertama, pengetahuan lokal bersifat kultural. Karakter ini mengacu pada sifat kolektif pengetahuan lokal, yaitu berada di level komunitas (*shared knowledge*), bukan di level individual (*individual knowledge*). Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan dan praktik lokal ini dikenali secara luas oleh anggota masyarakat di mana pengetahuan tersebut tumbuh (Rahman et al., 2020).

Kedua, ternalisasi pengetahuan lokal meniscayakan penyerapan yang kuat atau internalisasi oleh komunitas masyarakat yang memproduksi dan mempraktikkan pengetahuan khas tersebut dalam

kehidupan keseharian. Menurut George 2011Rahman et al., (2020) dalam Pengetahuan lokal mengakar dalam budaya dan tradisi masyarakat, dibentuk oleh pengalaman dan praktik keseharian masyarakat setempat, saling mempengaruhi dan termanifestasi dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa definisi bahkan menyatakan bahwa pengetahuan lokal bersifat 'menubuh' (*embodied*), dianggap sebagai sesuatu yang spontan dan alami karena telah menyatu dengan gestur, gerak badan, ekspresi tubuh, dan lainnya.

Ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan. Beberapa definisi menekankan keterkaitan manusia dengan lingkungan, yang bersumber pada pengalaman langsung manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan pengakuan bahwa kebudayaan tidak akan pernah bisa lepas dari lingkungan alam di mana budaya tersebut tumbuh dan berkembang. Di satu sisi kondisi lingkungan akan turut membentuk corak budaya tertentu, di sisi lain budaya yang dikembangkan manusia mampu mengubah kondisi lingkungan yang ada.

Keempat, terwariskan secara turun temurun. Karakter ini menunjukkan bahwa pengetahuan lokal yang bersumber dari pengalaman keseharian tersebut akan diwariskan kepada generasi selanjutnya dengan mekanisme mekanisme kultural tertentu. Pengetahuan dan praktik lokal merupakan proses berulang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Sillitoe

& Marzano 2009 dalam Rahman et al., 2020 proses transmisi lintas generasi tersebut akan dijumpai pembaruan dan perkembangan hingga membentuk sesuatu yang baru.

Kelima, pengambilan keputusan Pengetahuan lokal bersifat fungsional, dalam arti pengetahuan tersebut dikembangkan oleh komunitas lokal tertentu untuk mengatasi masalah-masalah kolektif yang dihadapi bersama. Pengetahuan dan praktik lokal selalu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan atau penyelesaian masalah tertentu yang dihadapi komunitas masyarakat setempat. Karakter ini mengindikasikan bahwa pengetahuan dan praktik lokal akan bersifat dinamis, mengikuti perkembangan permasalahan yang dihadapi komunitas (Rahman et al., 2020).

6. Pengetahuan Lokal dan Pengurangan Resiko Bencana

Mencermati beberapa ciri pengetahuan lokal tersebut, kita bisa menarik asumsi bahwa masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan bencana alam, di mana bencana alam terjadi dalam intensitas yang tinggi, akan mengembangkan pengetahuan dan praktik lokal tertentu untuk beradaptasi dengan ancaman bencana alam yang ada di lingkungan lokal mereka. Bencana alam, bagaimanapun skalanya, akan menimbulkan dampak tertentu bagi masyarakat setempat, yang pasti akan disikapi dengan membangun Kerangka pemahaman dan respons sosial tertentu untuk menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan bencana. Jika bencana itu kerap terjadi, maka kerangka pengetahuan

dan praktik sosial tersebut akan dibiasakan, dilembagakan secara kultural, dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Pengetahuan dan praktik sosial yang terlembagakan itulah yang kemudian kita kenali sebagai kearifan lokal atau *indigenous knowledge* dalam memahami dan merespons bencana alam (Rahman et al., 2020).

Pertama, kerangka interpretasi digunakan untuk memahami bencana yang terjadi, apakah bencana disebabkan oleh perilaku manusia, fenomena alam, fenomena mistik, atau gabungan beberapa hal tersebut (Rahman et al., 2020).

Kedua, kerangka praktik sosial untuk merespons bencana yang terjadi, yang tentu saja berkaitan erat dengan kerangka interpretasi atas bencana yang terjadi. Artinya, jika selnudi kelompok masyarakat memahami bencana sebagai hukuman atau cobaan Tuhan, maka respons sosial yang dihasilkan akan berbeda dengan kelompok masyarakat yang menubimi bencana tersebut sebagai fenomena alam semata. Dailien hanya kasis, kerangka interpretasi dan respons sosial in kompleks, tidak hanya Istrma interpretasi dan respons tunggal (Rahman et al., 2020).

7. Tantangan Penguatan Pengetahuan Lokal

Menurut Shaw dkk dalam tunggal Rahman et al., 2(020) bahwa dalam konteks kontemporer, kita harus mengakui bahwa telah banyak perhatian dan pengakuan diberikan terhadap peran pengetahuan dan praktik lokal dalam PRB, misalnya pengakuan dalam framework

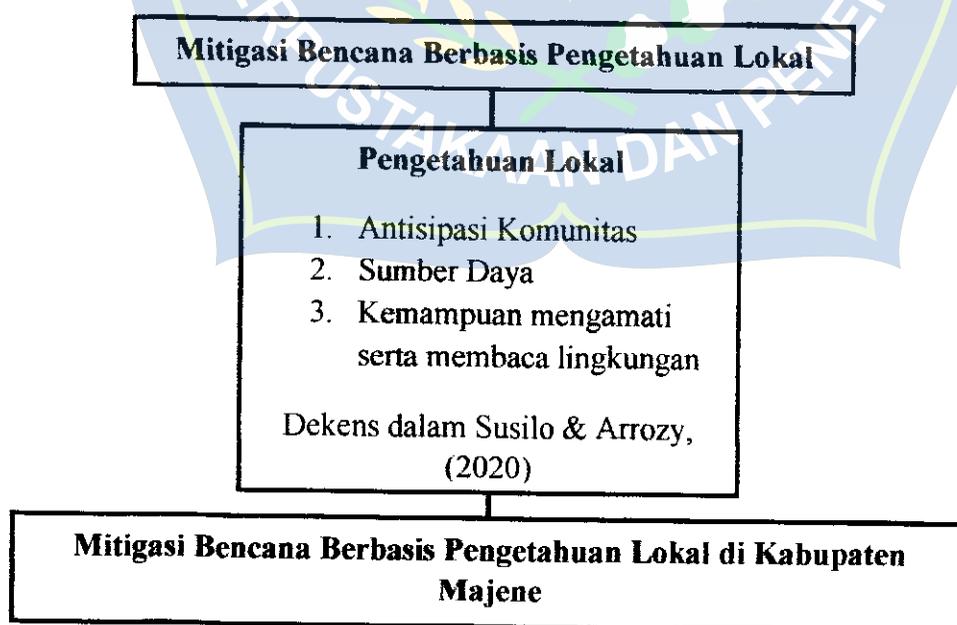
internasional untuk RB ataupun maraknya riset seputar pengetahuan lokal tentang bencana alam. Namun, belum terdapat langkah-langkah sistematis dan praktis untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat yang berketahanan bencana (*community resilience*).

Menurut Grenier dalam Rahman et al., (2020) terlebih, sebagian besar pengetahuan dan praktik lokal yang ada di negara-negara berkembang dipelihara dan diwariskan secara lisan (*oral tradition*) sehingga tidak terdokumentasikan dengan baik. Dalam situasi tersebut, maka ada beberapa hal yang membuat pengetahuan dan praktik lokal tersebut dapat hilang dan terdegradasi secara bertahap. Globalisasi, berbagai program pembangunan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah meningkatkan kerentanan pengetahuan dan praktik lokal yang ada di masyarakat.

Begitu juga, akulturasi budaya, marginalisasi ekonomi, dan tekanan lingkungan bisa membuat masyarakat tidak lagi tertarik untuk mempelajari dan melestarikan pengetahuan dan praktik lokal tersebut. Dalam sebagian kelompok, mobilitas penduduk dengan motif ekonomi, dalam bentuk migrasi dan urbanisasi, semakin menyebabkan pengetahuan dan praktik lokal tercabut dari akarnya. Hal tersebut diperparah dengan anggapan bahwa media atau saluran tradisional, di mana pengetahuan dan praktik lokal tersebut disimpan, dianggap tertinggal dan tidak lagi diminati oleh generasi muda.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir digunakan untuk memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini, dan menjabarkan dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak, dan sepenuhnya belum juga dapat diukur di lapangan. Adapun teori yang digunakan dalam mitigasi bencana berbasis pengetahuan lokal di Kabupateb Majene yaitu pertama tentang mitigasi bencana yang dijelaskan dalam Uu No 24 Tahun 2007 yang terdiri dari kegiatan prabencana, kegiatan saat terjadi bencana dan kegiatan pasca bencana. Sedangkan pengetahuan lokal menurut Dekens dalam Susilo & Arrozy (2020) terdiri dari Antisipasi Komunitas, Sumber Daya dan Kemampuan mengamati serta membaca lingkungan. Berikut lebih jelas digambarkan dalam gambar kerangka pikir penelitian.



Gambar 1
Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Dari kerangka pikir di atas maka fokus dari penelitian ini yaitu pengetahuan Lokal terdiri dari:

1. Antisipasi Komunitas
2. Sumber Daya
3. Kemampuan mengamati serta membaca lingkungan

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian berguna untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian nantinya di lapangan, berikut deskripsi fokus penelitian sebagai berikut. Berdasarkan teori yang digunakan dengan pendekatan (Dekens dalam Susilo & Arrozy, 2020) yang menjelaskan pengetahuan lokal dalam melakukan upaya mitigasi bencana berbasis pengetahuan lokal di Kabupaten Majene.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini sangat sesuai dengan judul penelitian ini, karena teori tersebut mampu menjelaskan dan mendeskripsikan sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini dengan tiga pendekatan mitigasi bencana yang berbasis pengetahuan lokal.

Pengetahuan lokal berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengenai kewaspadaan bencana yang akan terjadi atau cara-cara setempat untuk menafsirkan dan memantau peringatan dini di lingkungan setempat.

Berikut pengetahuan lokal berkaitan dengan terdiri:

a. Antisipasi Komunitas

Antisipasi komunitas yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah perkumpulan dengan membuat perhitungan tentang hal-hal yang belum atau terjadi terhadap situasi yang berbahaya dari dampak alam.

b. Sumber Daya

Sumber daya yaitu masyarakat setempat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan lokal. Sumber daya biasanya terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung mitigasi bencana.

c. Kemampuan mengamati serta membaca lingkungan.

Masyarakat setempat yang mempunyai kerifan lokal dari nenek moyangnya memiliki tata cara atau kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam yang ada mengenai bencana yang akan terjadi di lingkungan sekitarnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian yang digunakan yaitu selama 2 (dua) bulan mulai

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2016), metode kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandaskan filsafat postpositivisme. Dalam metode ini, peneliti harus bertindak menjadi instrumen kunci. Analisis datanya biasa bersifat induktif atau kualitatif kemudian hasil dari penelitian akan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada makna ari pada sebuah generalisasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif hasil dari penelitian akan memberikan gambaran-gambaran tentang kondisi atau fenomena yang terjadi secara terperinci atau detail. Sehingga peneliti berusaha menggambarkan dan menjabarkan hal-hal yang telah didapatkan di lapangan selama proses penelitian dalam skripsi ini. Maka dari itu penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif karena tipe ini yang lebih cocok untuk fokus dari penelitian ini.

C. Informan

Dalam sebuah penelitian, informan adalah orang-orang yang dapat memberikan sebuah informasi terkait yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun

informasi yang dibutuhkan peneliti sesuai dengan judul penelitian yaitu Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene dan segala hal yang menyangkut fokus penelitian tersebut. Dalam penentuan informan dari penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara memilih informan yang betul-betul memahami Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene agar bisa mendapatkan data yang akurat, adapun yang akan menjadi informan penelitian ini yaitu BNPB Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Majene dan Masyarakat.

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Gunawan M., S.Pd	G	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene
2.	Muhammad Arif	MA	Camat Ulumanda
3.	Ir. Basri Ibrahim.,	BI	Ketua Forum Studi Pengembangan Ada' Tuho
4.	Muhammad Asrul, SE	A	Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Majene
5.	Bandu	B	Tokoh Masyarakat Ulumanda
6.	H. Ibrahim	I	Masyaarakat Ulumanda

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah yang paling utama atau penting dalam sebuah penelitian. Tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan data-data penelitian Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene. Dengan menentukan teknik pengumpulan data apa yang akan digunakan maka peneliti akan mudah untuk mendapatkan data yang sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Teknik Observasi

Menurut Marshal (Sugiyono, 2016) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Maka dengan teknik observasi, peneliti bisa belajar mengenai perilaku, arti ataupun makna dari perilaku yang akan ditelitinya.

2. Teknik *Interview*/ Wawancara

Teknik pengumpulan data kedua yang akan digunakan yaitu teknik *interview* wawancara. Teknik wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara yaitu tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait tentang Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene. Peneliti akan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disusun peneliti sebelumnya. Setiap informan atau responden akan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti akan mencatat dan merekamnya.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan tentang kejadian ataupun

peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau data-data dari *literature*, media *online*, koran dan dokumen yang diberikan oleh informan tentang Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majeneyang masih relevan dengan penelitian. Menurut Sugiyono(Sugiyono, 2016), teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi bisa dilakukan dengan cara pengumpulan data dokumen yang berbentuk tulisan atau gambar-gambar dan karya-karya yang dirasa berasal dari sumber yang terpercaya dan ada kaitannya Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data model Miles dan Huberman, dalam teknik analisis ini menjelaskan tentang analisis data kualitatif dilakukan melalui cara interaktif dan terus menerus berlangsung yang dilakukan sampai tuntas serta menyebabkan datanya menjadi jenuh (Sugiyono, 2016). Berikut langkah-langkah teknik analisis data di bawah.

1. Data Reduction

Data yang telah diperoleh yang jumlahnya bisa dikatakan banyak perlu dilakukan pencatatan yang teliti dan terperinci. Ketika peneliti melakukan penelitian yang semakin lama, maka jumlah data akan semakin banyak dan kompleks serta menjadi rumit. Sehingga harus dilakukan penganalisaan data yang dinamakan dengan reduksi data.

2. Data Display (penyajian data)

Setelah data direduksi kemudian mendisplaykan data terkait tentang Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di

Kabupaten Majene. Dengan melakukan pendisplayan data dapat mempermudah dan merencanakan sesuatu.

3. *Conclusion Drawing: Verification*

Langkah selanjutnya adalah langkah analisis kualitatif, menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020) adalah penarikan sebuah kesimpulan dan akan dilakukan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bisa dikatakan bersifat sementara dan bisa berubah jika belum didapatkan bukti-bukti yang kuat sehingga mendukung penelitian ditahap pengumpulan data selanjutnya. Sebaliknya, jika kesimpulan telah dikemukakan pada tahap awal dan kemudian didukung oleh bukti-bukti yang telah valid dan tetap konsisten ketika peneliti kembali untuk melakukan penelitian, sehingga kesimpulan tentang Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene yang telah diambil dikatakan kesimpulan yang dianggap kredibel.

F. Teknik Pengabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian begitu penting dilakukan, bertujuan untuk menentukan validitas dan reliabilitas data yang telah didapatkan pada saat penelitian Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene. Dalam penelitian ini, teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data-data tentang Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene dari semua sumber yang telah diambil oleh peneliti dengan menggunakan macam-macam cara dan berbagai waktu tertentu

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu teknik yang digunakan dalam melakukan pengujian kredibilitas dengan mengecek data penelitian tentang Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majeneyang telah diperoleh dari semua sumber yang telah didapatkan oleh si peneliti.

2. Triangulasi Teknik

Kedua yaitu triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data-data terhadap sumber data tentang Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majeneyang telah didapatkan peneliti dengan teknik yang berbeda dari cara sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Salah satu yang mempengaruhi kredibilitas sebuah penelitian yaitu waktu. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui teknik wawancara contoh pada pagi hari, narasumber masih dalam keadaan jasmani yang segar, belum terjadi banyak masalah, maka data yang dia berikan akan lebih valid dan data akan lebih kredibel. Sehingga dalam pengujian kredibilitas hasil uji tersebut menghasilkan sebuah data penelitian yang berbeda, maka peneliti harus melakukannya secara berulang-ulang untuk dapat menemukan kepastian data.

BAB IV

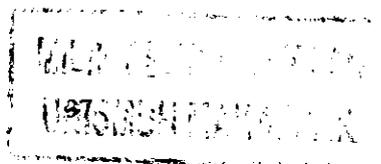
HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

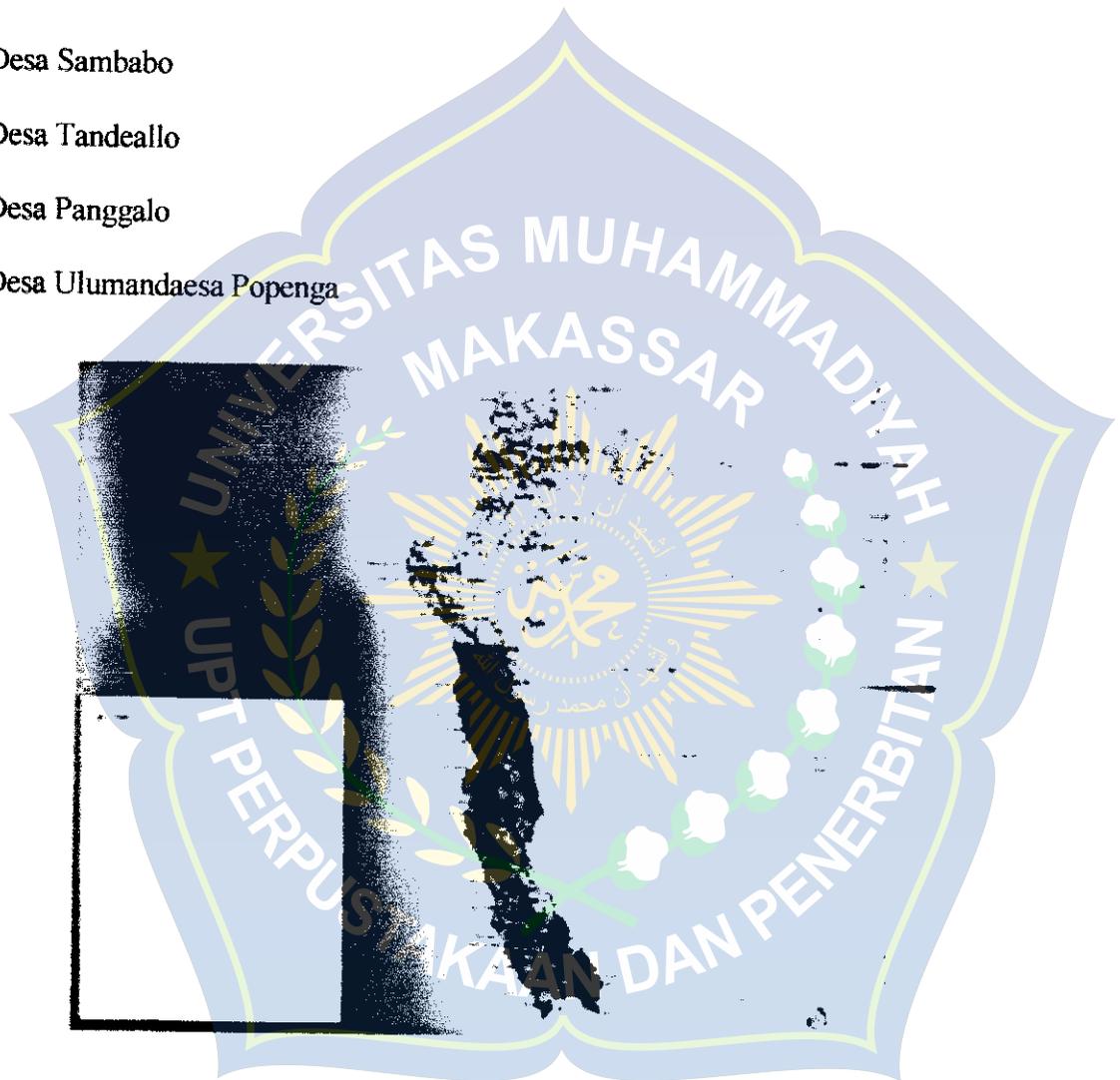
1. Gambaran Umum Kabupaten Majene

Kabupaten Majene adalah salah satu Daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Majene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 947,84 km² mempunyai posisi wilayah yang strategis, terletak sekitar 302 km sebelah utara Kota Makassar. Kabupaten Majene adalah salah satu dari 6 Kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dengan panjang pantai 125 Km yang terletak di pesisir pantai Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Kabupaten Majene terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammero'do Sendana, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda, yang meliputi 62 desa, 20 kelurahan, 257 dusun dan 104 lingkungan. Ibukota Kabupaten Majene terletak di Kecamatan Banggae. Secara geografis Kabupaten Majene terletak pada posisi 2o38'45" sampai dengan 3o38'15" Lintang Selatan dan 118o45'00" sampai 119o4'45" Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan di sebelah utara Kabupaten Mamuju, sebelah timur Kabupaten Polewali Mandar, sebelah selatan Teluk Mandar, dan sebelah Barat adalah Selat Makassar.

Fokus dari penelitian ini ialah Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene yang merupakan kecamatan terluas dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kecamatan ini mencakup wilayah seluas 456.00 km Pada tahun 2019, terdapat 9.574 jiwa yang menempati kecamatan ini, kecamatan mencakup 8 desa yang terdiri dari:



- a. Desa Salutambung
- b. Desa Sulai
- c. Desa Kabiraan
- d. Desa Sambabo
- e. Desa Tandeallo
- f. Desa Panggalo
- g. Desa Ulumandaesa Popenga



Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Majene.

Kabupaten Majene mempunyai Visi dan misi sebagai berikut :

a. VISI

Majene unggul, mandiri dan religius
 Unggul
 Menjadikan Kabupaten Majene sebagai daerah yang senantiasa terdepan dalam pembangunan sumber daya

manusia yang berdaya saing, peningkatankualitas penyelenggaraan pemerintahan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regionalMandiriMengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berbasis kearifan local dan pemberdayaan untuk menciptaka stabilitas pertumbuhan ekonomi, serta memiliki militansi terhadap arus perubahan global dengan mengendalikan kekuatan dan kemampuan sendiriReligiusbermakna bahwa kehidupan masyarakat Kabupaten Majene yang mengamalkan nilai nilai agama dan budaya yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman tentram dan nyaman

b. Misi : Majene Mamis 2

- a) Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat majene yang berkualitas.
- b) Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- c) Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam bidang pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata.
- d) Meningkatkan Pembangunan infrastruktur bagi percepatan aspek-aspek pembangunan.
- e) Sumpremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional dalam peningkatan kapasitas aparatur didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene

a. Tugas pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.9 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

b. Struktur Organisasi



3. Tugas dan Fungsi Pokok Aparatur BPBD

1) Kepala

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan kewenangan bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, meliputi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien

b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

2) Unsur Pengarah

Unsur pengarah penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD. Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah.
- b) Pemantauan
- c) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3) Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut sebagai unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, pascabencana, dan Pemadam Kebakaran secara terintegrasi.

4) Kepala Pelaksana

Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

- a) Penetapan program kerja BPBD
- b) Perumusan kebijakan teknis bidang Penanggulangan Bencana Daerah
- c) Pelaksanaan pembinaan ketatausahaan
- d) Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing.
- e) Pemberian petunjuk dan bimbingan serta pengawasan kepada bawahan;
- f) Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan
- g) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, serta Pemadam Kebakaran secara adil dan setara
- h) Penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Pemadam Kebakaran berdasarkan peraturan perundang–undangan
- i) Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana
- j) Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana dan Kebakaran.
- k) Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana dan Kebakaran
- l) Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan
- m) Pelaporan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati.
- n) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5) Sekretariat

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD.
- b) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol.
- d) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- e) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya, dan
- f) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- g) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:

- a) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- b) Sub Bagian Keuangan.
- c) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan program, data dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan rencana hasil kegiatan Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat.
- b) Penyusunan laporan hasil kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat.
- c) Pengaturan, pendistribusian, dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- d) Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e) Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan.
- f) Pelaksanaan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang penanggulangan bencana.
- g) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan Keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan.
- b) Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat.
- c) Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing.
- d) Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e) Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan.
- f) Penyusunan rencana anggaran biaya langsung dan tak langsung.
- g) Penyelenggaraan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan.
- h) Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan BPBD.
- i) Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan.
- j) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan

kepegawaian dan umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- b) Penyusunan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat.
- c) Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d) Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- e) Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan.
- f) Penyiapan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan BPBD.
- g) Pelaksanaan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas, perjalanan dinas dan keprotokolan.
- h) Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor.
- i) Penyiapan data dan membuat laporan kepegawaian.
- j) Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai.
- k) Pengevaluasian dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
- l) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6) Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

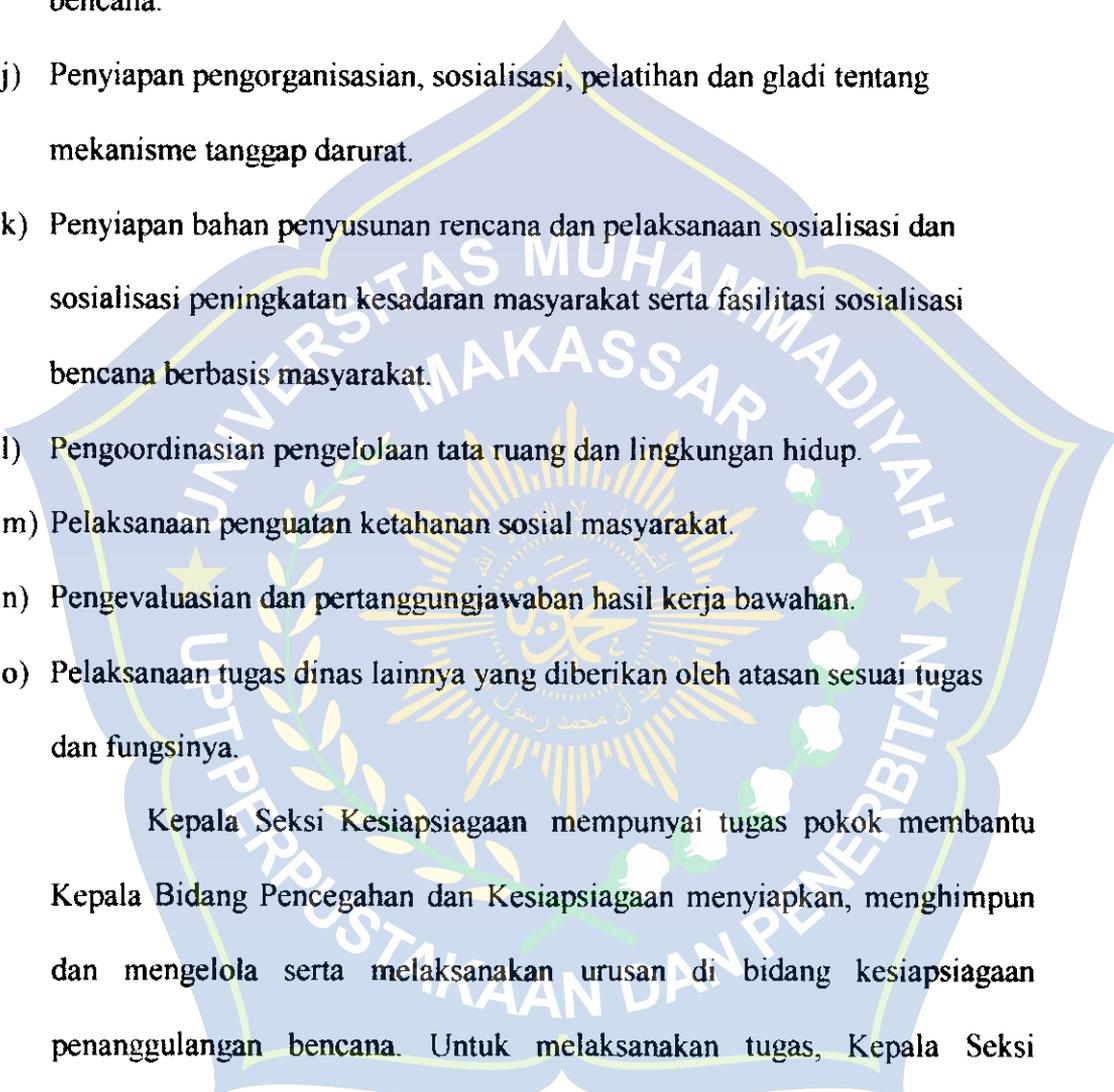
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 7) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari Seksi Pencegahan dan Seksi Kesiapsiagaan. Bidang ini masing-masing dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

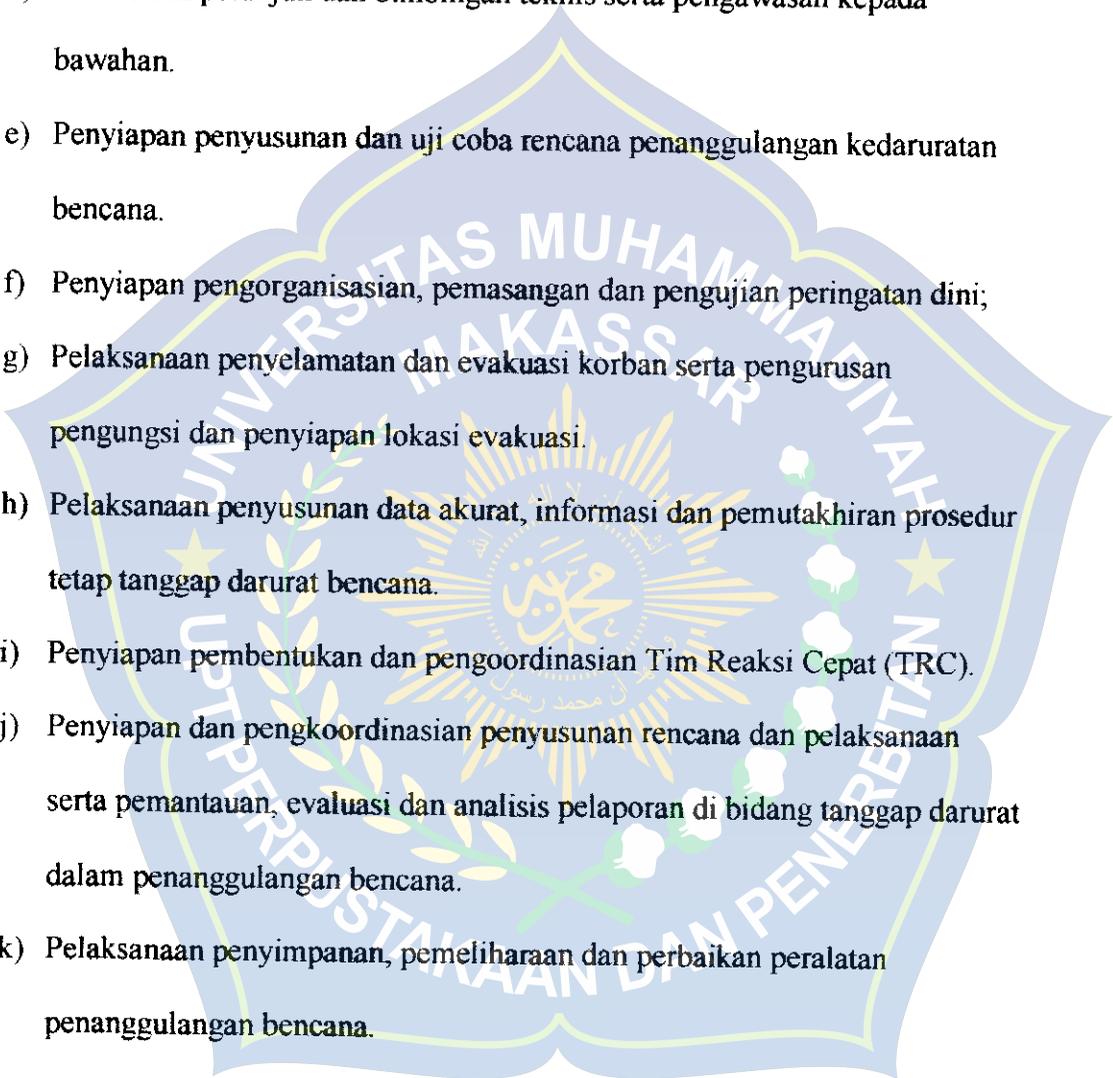
Kepala Seksi Pencegahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang pencegahan penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan rencana kegiatan Seksi Pencegahan.
- b) Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Seksi Pencegahan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- c) Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing.
- d) Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan.
- e) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana.
- f) Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan hubungan kerja di bidang pencegahan penanggulangan bencana.
- g) Pelaksanaan identifikasi dan analisis terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana serta risiko yang dapat terjadi.
- h) Pelaksanaan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba–tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana.

- 
- i) Pelaksanaan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana.
 - j) Penyiapan pengorganisasian, sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
 - k) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan sosialisasi dan sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi sosialisasi bencana berbasis masyarakat.
 - l) Pengekoordinasian pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup.
 - m) Pelaksanaan penguatan ketahanan sosial masyarakat.
 - n) Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan.
 - o) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan rencana kegiatan Seksi Kesiapsiagaan.
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Seksi Kesiapsiagaan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

- 
- c) Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing.
 - d) Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
 - e) Penyiapan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
 - f) Penyiapan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
 - g) Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban serta pengurusan pengungsi dan penyiapan lokasi evakuasi.
 - h) Pelaksanaan penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
 - i) Penyiapan pembentukan dan pengoordinasian Tim Reaksi Cepat (TRC).
 - j) Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang tanggap darurat dalam penanggulangan bencana.
 - k) Pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penanggulangan bencana.
 - l) Pengevaluasian dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan.
 - m) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8) **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- b) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- c) Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- d) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e) Pemantuan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- f) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- a) Seksi kedaruratan
- b) Seksi Logistik

Bidang masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Kedaruratan dan Logistik. Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan rencana Kegiatan Seksi Kedaruratan.
- b) Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Kedaruratan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- c) Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- d) Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e) Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan.
- f) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, komando pelaksanaan dan hubungan kerja di bidang kedaruratan;
- g) Penyiapan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasi
- h) Penyiapan perencanaan, pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi darurat
- i) Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta analisis pelaporan data dalam kondisi tanggap darurat
- j) Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pertolongan pertama pada korban bencana.
- k) Penyiapan perencanaan dan pelaksanaan perbaikan sarana prasarana darurat pendukung penanggulangan bencana prabencana dan pascabencana.

- l) Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan.
- m) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Logistik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang penanganan pengungsi dan pendistribusian logistik penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Logistik mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan rencana seksi logistik.
- b) Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Seksi Logistik sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- c) Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing.
- d) Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e) Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan.
- f) Penyusunan perencanaan dan inventarisasi kebutuhan logistik dan peralatan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.
- g) Pelaksanaan penyediaan dan penyiapan logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana.
- h) Penyiapan persediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
- i) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemberian bantuan sandang pangan dan air bersih pada saat tanggap darurat.

- j) Pengekoordinasian dalam penyimpanan dan pendistribusian bantuan logistik dan air bersih pada saat tanggap darurat.
- k) Pengekoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan hunian sementara beserta fasilitasnya bagi korban bencana pada saat tanggap darurat.
- l) Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
- m) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

9) **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah Unsur Pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b) Pengekoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c) Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;

- d) Pemantauan, evaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
- e) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a) Seksi Rehabilitasi;
- b) Seksi Rekonstruksi.

Bidang sebagai mana masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang rehabilitasi penanganan pascabencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan rencana kegiatan Seksi Rehabilitasi;
- b) Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Rehabilitasi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- c) Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing;

- d) Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e) Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan;
- f) Penyiapan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi penanganan pasca bencana;
- g) Pelaksanaan rehabilitasi pada lokasi bencana;
- h) Pengoordinasian pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi serta penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat.
- i) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi.
- j) Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan.
- k) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Rekonstruksi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyiapkan, menghimpun dan mengelola serta melaksanakan urusan di bidang rekonstruksi penanganan pascabencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan rencana kegiatan Seksi Rekonstruksi.
- b) Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Rekonstruksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- c) Pengaturan, pendistribusian dan pengkoordinasian tugas–tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing–masing.
- d) Pemberian petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan.
- e) Pelaksanaan pemeriksaan hasil kerja bawahan.
- f) Penyiapan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi penanganan pasca bencana.
- g) Pelaksanaan rekonstruksi pada lokasi bencana.
- h) Pengaturan standarisasi rekonstruksi bangunan.
- i) Pelaksanaan rekonstruksi pada wilayah bencana.
- j) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat rekonstruksi serta penanganan pengungsi.
- k) Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rekonstruksi.
- l) Pengevaluasian dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan.
- m) Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

10) Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mengelola unit pemadam kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana program kerja Bidang Pemadam Kebakaran sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- b) Melaksanakan pembinaan teknis di Bidang Pemadam Kebakaran.
- c) Melaksanakan pemantauan evaluasi dan pengawasan dibidang Pemadam Kebakaran.
- d) Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan operasional Pemadam Kebakaran.
- e) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pemadam Kebakaran dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugas.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

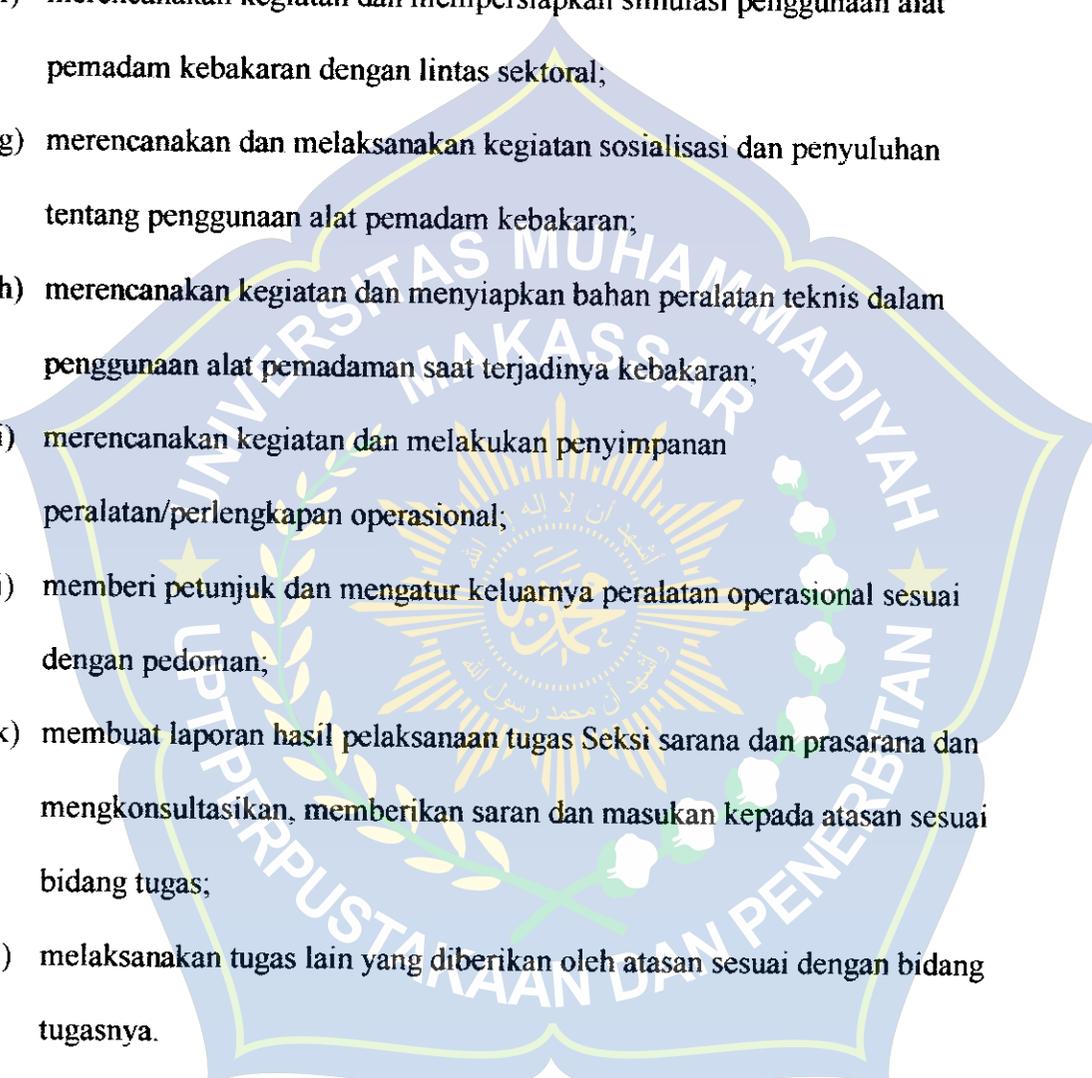
- a) Seksi Pemadam kebakaran
- b) Seksi sarana dan prasarana

Bidang masing-masing Seksi di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pemadam kebakaran mempunyai tugas melakukan pencegahan, penyelamatan mengkoordinasikan dan mengamati situasi sebab-sebab kebakaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi pemadam kebakaran mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemadam Kebakaran sebagai acuan pelaksanaan tugas.

- b) Mencegah, menyelamatkan, menanggulangi dan mengurangi timbulnya kerugian harta benda dan korban jiwa akibat terjadinya bencana kebakaran.
 - c) Menyelamatkan dan melindungi segala harta benda/material baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak akibat terjadinya bencana kebakaran.
 - d) Mengkoordinasikan operasional penyelamatan dan penanggulangan yang menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa akibat terjadinya bencana kebakaran.
 - e) Mencegah timbulnya bencana kebakaran akibat ulah manusia.
 - f) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemadam Kebakaran dan memberi saran, pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
 - g) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya
- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu kepala bidang Pemadam Kebakaran dalam perencanaan, pengadaan, perawatan dan penyimpanan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana dan program
- b) kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) melaksanakan kegiatan urusan Sarana dan Prasarana;
- d) merencanakan kegiatan dan mengusulkan pengadaan peralatan/perlengkapan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan operasional penanggulangan bahaya kebakaran;

- 
- e) merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatkan SDM petugas pemadam kebakaran;
 - f) merencanakan kegiatan dan mempersiapkan simulasi penggunaan alat pemadam kebakaran dengan lintas sektoral;
 - g) merencanakan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang penggunaan alat pemadam kebakaran;
 - h) merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan peralatan teknis dalam penggunaan alat pemadaman saat terjadinya kebakaran;
 - i) merencanakan kegiatan dan melakukan penyimpanan peralatan/perlengkapan operasional;
 - j) memberi petunjuk dan mengatur keluaranya peralatan operasional sesuai dengan pedoman;
 - k) membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi sarana dan prasarana dan mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada atasan sesuai bidang tugas;
 - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Hasil Penelitian Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan sumber dan penyebabnya, bencana dapat dikelompokkan menjadi: (a) Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung api, kekeringan, angin ribut dan tsunami. (b) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. (c) Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Menurut Coburn et al (1994) mitigasi berarti mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh-pengaruh dari satu bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Istilah mitigasi berlaku untuk cakupan yang luas dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang mungkin

diawali, dari yang fisik, seperti membangun bangunan-bangunan yang lebih kuat, sampai dengan yang prosedural, seperti teknik-teknik yang baku untuk menggabungkan penilaian bahaya di dalam rencana penggunaan lahan.

Kearifan atau *wisdom* merupakan suatu pemahaman kolektif, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang mempengaruhi keputusan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah kehidupan. Kearifan dalam hal ini merupakan perwujudan seperangkat pemahaman dan pengetahuan yang mengalami proses perkembangan oleh suatu kelompok masyarakat setempat atau komunitas yang terhimpun dari proses dan pengalaman panjang dalam berinteraksi dalam satu sistem dan dalam satu ikatan hubungan yang saling menguntungkan.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Dekens dalam Susilo & Arrozy, (2020) Pengetahuan Lokal dengan tiga indikator Antisipasi Komunitas, Sumber Daya Kemampuan mengamati serta membaca lingkungan :

a. Antisipasi Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene

Antisipasi Komunitas Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene merupakan upaya yang dilakukan oleh seluruh pihak yang (*stakeholder*) ikut andil dalam memberikan penanggulangan mitigasi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Majene. Kabupaten Majene adalah daerah yang termasuk dalam daftar indeks bencana

beresiko tingkat tinggi, sehingga diperlukan upaya penanggulangan dalam meminimalisir bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas yang sangat besar dalam melakukan penanggulangan bencana. Namun, salah satu hal yang menjadi tolak ukur dalam penanggulang Mitigasi Bencana yang sifatnya berbasis pengetahuan lokal. Maka dari itu diperlukan sinergitas dari seluruh pihak yang terlibat antara pemerintah daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene dengan Masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene:

“Jadi tindakan awal yang kami lakukan dalam mengatasi bencana alam di kabupaten majene karna yang sangat berpotensi terjadi bencana ada diwilayah pesisir laut yang ada di kabupaten majene, bentuk awal dalam penanggulangan bencana ini adalah pembuatan tanggul dan penanaman pohon mangrove untuk mengurangi terjadinya bencana seperti abrasi dan angin puting beliung. (Wawancara, G, 27 Februari 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan keseriusan Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene dalam mengantisipasi bencana alam yang terjadi khususnya di wilayah pesisir laut Majene. Tindakan awal yang dilakukan yakni dengan pembuatan tanggul dipesisir laut majene juga dengan melakukan penanaman pohon mangrove di sepanjang pantai yang fungsinya mampu mengurangi resiko tinggi bencana yang akan terjadi.

Selanjutnya Hasil wawancara:

“Kemudian kami melakukan sosialisasi di beberapa sekolah kepada tenaga pendidik juga kepada masyarakat setempat yang tujuannya tentang pentingnya penanggulangan bencana mitigasi bencana guna memberikan edukasi agar masyarakat dapat paham dan sadar bagaimana tindakan yang diambil untuk mengantisipasi bencana .(Wawancara, G, 27 Februari 2022).”

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan keseriusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene bahwa dalam menyukseskan penanggulangan bencana diperlukan sinergitas semua pihak agar mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya penanggulangan bencana dengan mengedukasi masyarakat juga melakukan sosialisasi tentang mitigasi bencana ke sekolah yang ada di Kabupaten Majene untuk menumbuhkan kesadaran kesemua pihak dan mendukung pemerintah dalam mengantisipasi bencana alam.

Dari hasil wawancara di atas bahwa Antisipasi Komunitas sudah dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan yang di akibatkan bencana alam. Mengingat bahwa resiko bencana yang terjadi di Kabupaten Majene di antaranya baik itu Abrasi maupun Tsunami.

Hal ini kemudian didukung oleh pernyataan Kabid kesiapsiagaan :

“Selain itu upaya yang kami lakukan adalah mensosialisasikan konstruksi bangunan sesuai ketentuan standar, namun di majene pada umumnya kebanyakan konstruksi bangunan yang Non Permanen dengan kata lain terbuat dari rumah kayu yang tentunya rumah kayu lebih tahan dari guncangan gempa bumi di banding rumah permanen yang terbuat dari batu.Hampir semua daerah yang ada di Kabuten Majene ini kami melakukan sosialisasi pentingnya antisipasi dan mitigasi bencana baik itu di kalangan tenaga pendidik, pelajar dan masyarakatpada umumnya” (Wawancara, MA, 27Januari 2022).

Upaya Antisipasi Komunitas sangatlah besar mengingat di Majene adalah daerah yang beresiko tinggi dalam terjadinya bencana, meski banyak kendala tapi upaya yang dilakukan untuk antisipasi maupun meminimalisir kerusakan ketika terjadi bencana, mulai dari pembuatan tanggul, pemecah ombak, penanaman pohon mangrove dan sosialisasi pentingnya mitigasi bencana.

Hal tersebut hampir selaras apa yang di katakan Pak Camat Ulumanda dalam hasil wawancaranya:

“Belajar dari bencana yang terjadi pada tahun 1969, Ulumanda pada khususnya yang letak daerahnya lebih kebanyakan di perbukitan jadi sejauh ini belajar dari pengalaman ada 2 (dua) jenis bencana yang sangat beresiko tinggi dan memang harus di antisipasi yakni gempa bumi dan longsor” (wawancara dengan informan MA pada Senin, 31 Januari 2022).

Dari hasil wawancara di atas bahwa pemerintah setempat harus mampu mengasimilasi lingkungan, serta dapat memberikan sosialisasi dalam hal bahaya bencana kepada masyarakat secara umum. Lanjut hasil wawancara Pak Camat Ulumanda:

“Alhamdulillah pada saat gempa yang terjadi di Kab. Majene yang melanda dua kecamatan tersebut salah satunya kecamatan ulumanda tidak ada korban jiwa namun beberapa warga harus meninggalkan rumah dikarenakan kondisi rumah tidak bisa ditempati dan ada pula yang warga yang masih bertahan di sekitar rumah dengan menggunakan tenda dari berbagai bantuan baik dari relawan maupun pemerintah. Oleh karena itu masyarakat harus tetap siapsiaga dalam hal bencana mengingat kondisi wilayah kecamatan ulumanda sudah pernah terdampak gempa bumi. (Wawancara, MA pada Senin 31, Januari 2022)

Dari hasil wawancara di atas bahwa pemerintah, masyarakat dan relawan dari berbagai unsur harus mampu membangun komunikasi yang

baik dari segi kesiapsiagaan dalam hal bencana alam serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang asimilasi lingkungan.

Berdasarkan beberapa pendapat dari hasil wawancara dengan informan dan juga pengamatan langsung yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa upaya antisipasi komunitas sangatlah penting untuk di wilayah kabupaten majene, mengingat indeks resiko bencana (IRBI) ada 3 (tiga) kabupaten kota dan salah satunya adalah kabupaten majene provinsi sulawesi barat dengan skor (216,08). Untuk itu berbagai unsur baik dari pemerintah, masyarakat dan relawan harus mampu membangun komunikasi yang baik demi mengantisipasi bencana-bencana susulan yang mungkin saja terjadi.

Hal tersebut juga ditambahkan dalam hasil wawancara dengan Ir. Basri Ibrahim (Ketua Forum Studi Pengembanagan Ada'Tuho

“saya selaku tokoh masyarakat melihat bahwa yang menjadi spirit bagi masyarakat adalah aktivitas membangun gotong royong dan hubungan emosional yang sangat kuat hal ini sudah berangsur lama di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat khususnya di Ulumanda hal ini bisa di lihat dari semua aspek kehidupan, apapun yang di lakukan masyarakat akan dilakukan secara bersama atau gotong royong ini menjadi salah satu faktor penunjang bagi masyarakat. Tidak jauh-jauh bahwa bisa di liat dari kejadian bencana alam gempa bumi yang melanda Sulawesi Barat, Di kabupaten majene terdapat 2 kecamatan yang ikut merasakan dasyatnya gempa bumi yang terjadi pada tanggal 14 januari 2021.(Wawancara BI pada Rabu 2, Februari 2022)

Dari hasil wawancara di atas terdapat beberapa poin utama dalam aturan bermasyarakat di antaranya hubungan emosional yang masih erat kaitannya dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain dan kegiatan gotong

royong yang menjadi rutinitas masyarakat sampai saat ini. Lanjut wawancara Ir. Basri Ibrahim:

“Dari situ bisa terlihat bahwa yang menjadi spirit adalah kuatnya hubungan emosional dan tingginya rasa kemanusiaan yang di topang oleh sifat gotong royong. Tentunya masyarakat ulumanda juga yakin dan percaya terhadap adat istiadat yang di jadiakata falsafah dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh kearifan dengan hal ini masyarakat mengenal dengan sebutan Ada’Tuho. Tentunya pembuat konstruksi bangunan rumah yang berbahan baku kayu, kenapa demikian selain rumah kayu adalah rumah adat masyarakat lokal rumah kayu juga fleksibel dan lebih tahan dari gonjangan gempa bumi. (Wawancara BI pada Rabu 2, Februari 2022).

Berdasarkan Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam mengatasi mitigasi bencana berbasis pengetahuan lokal sehingga hal-hal yang sifatnya pengetahuan lokal masyarakat sangat dipercaya dan diyakini. Sehingga masyarakat masih tetap memegang erat keyakinan atau adat istiadat khususnya masyarakat ulumanda dan malunda begitu juga masyarakat di Kabupaten Majene secara umum yang dinamakan Ada’ Tuho sebagai prinsip dalam berkehidupan.

b. Sumber Daya Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene

Sumber daya yaitu masyarakat setempat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan lokal. Sumber daya biasanya terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung mitigasi bencana.

Masyarakat setempat yang menerapkan cara hidup tradisional di daerah pedesaan, yang nyaris tak tersentuh teknologi umumnya dikenal sebagai masyarakat suku atau masyarakat hukum adat, penduduk asli atau

masyarakat tradisional. Masyarakat setempat seringkali menganggap diri mereka sebagai penghuni asli kawasan terkait, dan mereka biasanya berhimpun dalam tingkat komunitas dan demikian dapat menyebabkan perbedaan rasa kepemilikan antara masyarakat asli/pribumi dengan penghuni baru yang berasal dari luar, sehingga masyarakat setempat seringkali menjadi rekan yang tepat dalam konservasi.

Di sebagian besar penjuru dunia, semakin banyak masyarakat setempat telah berinteraksi dengan kehidupan modern, sehingga sistem nilai mereka telah terpengaruh, dan diikuti penggunaan barang dari luar. Pergeseran nilai akan beresiko melemahnya kedekatan masyarakat asli dengan alam sekitar, serta melunturkan etika konservasi setempat (Nusantoro, 2020).

Berikut hasil wawancara dengan IrBasri Ibrahim (Ketuan Forum Studi Pengembangan Ada' Tuho):

‘Yang menjadi kekuatan besar bagi masyarakat adalah tak lain mampu berdampingan dengan alam, masyarakat hingga hari ini mampu menyesuaikan dengan pengalaman yang ada sebelumnya seperti bencana alam yang terjadi pada tahun 1969 itu sudah menjadi pelajaran besar masyarakat untuk memyenal lingkungan’ (Wawancara BI pada Rabu 2, Februari 2022)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa semangat gotong royong yang dilakukan masyarakat ulumanda sangat kuat, Tentunya masyarakat ulumanda juga yakin dan percaya terhadap adat istiadat yang di jadiakatkan palsafah dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh kearifan dengan hal ini masyarakat mengenal dengan sebutan Ada' Tuho.

Hal ini kemudian didukung oleh pernyataan camat ulumanda dalam wawancaranya yang mengatakan:

“Tentunya semua daerah masing-masing punya kultur kebiasaan tersendiri begitupun dengan Ulumanda. Itu di ataur dalam adat yang di istilahkan Adat Tuho, Adat Tuho sendiri mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Segala bentuk kehidupan di atur dalam Adat Toho. Begitupun dengan Mitigasi Bencana yang berbasis kearifan lokal, Kolektivitas yang tinggi adalah spirit utama bagi masyarakat Ulumanda, Selepas dari itu masyarakat Ulumanda pada khususnya sangat percaya dan menuakan pemangku adat. Selain itu rumah panggung yang terbuat dari kayu adalah rumah adat Ulumanda yang menjadi rumah turun temurun masyarakat Ulumanda, selain dari rumah adat rumah panggung juga mampu meminimalisir terjadinya kerusakan yang di akibatkan bencana dalam hal ini gempa bumi.(Wawancara MA pada Senin 31, Januari 2022)

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa semangat gotong royong masyarakat ulumanda tertuang dalam nilai-nilai adat istiadat adat tuho, yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Begitupun dengan Mitigasi Bencana yang berbasis kearifan lokal, Kolektivitas yang tinggi adalah spirit utama bagi masyarakat Ulumanda, Selepas dari itu masyarakat Ulumanda pada khususnya sangat percaya dan menuakan pemangku adat.

Hal ini selanjutnya didukung oleh pernyataan Tokoh masyarakat dalam wawancaranya yang mengatakan:

“Sekarang masyarakat sudah mampu memahami semangat gotong royong dimana sangat menghargai ada istiadat yang ada di kec.ulumanda. dan itu tidak terlepas dari ajaran-ajaran leluhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. karna itu masyarakat harus mampu berkomunikasi yang baik kepada pemerintah dan orang-orang yang terkait baik dari segotong royong maupun hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan.(Wawancara B pada Senin 7, Februari 2022)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses kerja sama yang baik akan melahirkan komunikasi yang baik dengan melihat spirit

utama bagi masyarakat ulumanda yang percayadan menuangkan pemangku adat. Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat:

“Masyarakat pada umumnya sudah lama hidup berdampingan dengan alam sehingga mampu menyesuaikan dengan alam secara harmonis, sehingga ada cara tersendiri memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ada hal yang luar biasa terjadi pada bencana 69, pada 23 Februari 1969 terjadi gempa bumi yang melanda pesisir pantai Majene sehingga mengakibatkan tsunami atau yang dikenal lembong tallu yang melanda beberapa wilayah termasuk Malunda, pada saat tsunami atau lembong mau menghantam wilayah Malunda orang sini menyebut Pokkali Malunda pada saat warga lainya mengungsi di bagian perbukitan Pokkali Malunda justru kebibir pantai dengan songkok hitam yang di lilit surban tiba di pantai, Pukkali Malunda membaca do'a untuk kemudian mengibaskan surbannya. Berkat restu Allah SWT “lembong tallu” tersebut terbelah. (Wawancara I pada Senin 14 Februari 2022)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi spirit bagi masyarakat adalah aktivitas membangun gotong royong hal ini sudah beransur lama, itu di ataur dalam adat yang di istilahkan Adat Tuho, Adat Tuho sendiri mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat begitupun dengan mitigasi bencana yang mengutamakan kesadaran masyarakat untu gotong royong dalam hal bencana tersebut serta tidak terlepas dari ajaran-ajaran leluhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

c. Kemampuan mengamati serta membaca lingkungan Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene

Mitigasi bencana alam merupakan salah satu tahap dari pra bencana. Setiap daerah mempunyai sistem pengetahuan tradisional tersendiri bahkan telah melahirkan inovasi pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan

sumber daya alam yang unik berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu pemahaman kolektif, pengetahuan dan kebijaksanaan yang mempengaruhi keputusan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah kehidupan.

Dalam kearifan lingkungan juga terwujud konserfasi yang dilakukan oleh masyarakat. Kearifan lokal yang diwujudkan dalam bentuk perilaku adaptif terhadap lingkungan yang mempunyai peranan penting dalam penurunan resiko bencana. Masyarakat setempat yang mempunyai kearifan lokal dari nenek moyangnya memiliki tata cara atau kemampuan untuk membaca tanda-tanda alam yang ada mengenai bencana yang akan terjadi di lingkungan sekitarnya.

Adapun terkait dengan penerapannya lebih lanjut dijelaskan Ir Basri Ibrahim (Ketuan Forum Studi Pengembangan Ada'Tuho) dalam wawancaranya:

“kalau berbicara mengamati lingkungan mitigasi bencana hampir semua masyarakat ulumanda lebih memilih konstruksi bangunan rumah yang berbahan baku kayu, kenapa demikian selain rumah kayu adalah rumah adat masyarakat lokal rumah kayu juga fleksibel dan lebih tahan dari guncangan gempa bumi.” (wawancara dengan informan BI pada Rabu 2, Februari 2022)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat jika hampir semua masyarakat lebih memilih bangunan rumah dari bahan kayu sebagai upaya dalam mengatasi mitigasi bencana serta melihat kondisi daerah ulumanda sudah pernah terjadi gempa bumi.

Selanjutnya diperjelas oleh camat ulumanda dalam wawancaranya dengan mengatakan:

“memang masyarakat secara umum sudah melihat serta mengamati disetiap kejadian-kejadian yang mungkin saja terjadi, olehnya itu masyarakat ulumanda berupaya dalam mengatasi mitigasi bencana, pengetahuan tradisional tersendiri bahkan telah melahirkan inovasi pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam yang unik berbasis kearifan lokal.(wawancara MA pada Senin 31, Januari 2022)

Berikutnya hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan.

Ulumanda:

“iya betul pembukaan lahan yang ada di desa kabiraan kec.ulumanda pasca gempa 15 january 2021 kemarin masyarakat telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk pembukaan lahan terkait pemukiman warga setempat melihat situasi dan kondisi pemukiman yang sebelumnya tidak layak untuk digunakan.(Wawancara, I pada Senin 14, Februari 2022)

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengamati mitigasi bencana melalui pengetahuan tradisional serta pengetahuan lokal masyarakat bergotong royong dalam mengatasi mitigasi bencana. Selanjutnya wawancara tokoh masyarakat:

“pada dasarnya masyarakat sudah lama berdampingan dengan alam sekitar dan tentunya kami selaku masyarakat sudah tahu dan mengenal lingkungan pada umumnya di Kabupaten Majene terkhusus Kecamatan Ulumanda. Di Ulumanda sendiri ada 2 (dua) bencana yang sering terjadi yaitu gempa bumi dan tanah lonsor, berdasarkan pengalaman tersebut masyarakat mengantisipasi dengan efektif contohnya penetapan lahan pemukiman dan menghindari lereng gunung yang rentang terjadi lonsor kemudian kontruksi bangunan rumah itu di dominasi rumah semi permanen dan non permanen yang terbuat dari kayu, ini untuk meminimalisir kerusakan yang di akibatkan gempa bumi”.(Wawancara B pada Senin 7, Februari 2022)

Berdasarkan beberapa pendapat dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana yang ada di kecamatan ulumanda sudah dilakukan beberapa pengamatan baik dari unsur pemerintah, ketua study pengembangan ada tuho serta tokoh masyarakat dengan melakukan pengetahuan-pengetahuan lokal dan inovasi pengelolaan

lingkungan, namun tidak terlepas dari itu inovasi ini perlu adanya pengembangan dan komunikasi yang baik dari berbagai stekolder yang ada demi terwujudnya masyarakat yang mampu mengatasi mitigasi bencana dengan berbasis lokal melalui pengetahuan tradisional sesuai dengan adat istiadat.



C. Pembahasan Mitigasi Bencana Berbasis Pengetahuan Lokal Masyarakat di Kabupaten Majene

Mitigasi berarti mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi pengaruh- pengaruh dari satu bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Istilah mitigasi berlaku untuk cakupan yang luas dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang mungkin diawali, dari yang fisik, seperti membangun bangunan-bangunan yang lebih kuat, sampai dengan yang prosedural, seperti teknik-teknik yang baku untuk menggabungkan penilaian bahaya di dalam rencana penggunaan lahan (Coburn et al., 1994).

Mitigasi mencakup tidak hanya menyelamatkan hidup dan mereka yang terluka dan mengurangi kerugian-kerugian harta benda, akan tetapi juga mengurangi konsekuensi-konsekuensi yang saling merugikan dari bahaya-bahaya alam terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi dan institusi-institusi sosial (Coburn et al., 1994). Tahap pertama dan penting yang penting dalam setiap strategi mitigasi adalah memahami sifat bahaya-bahaya yang mungkin akan dihadapi (Coburn et al., 1994).

Secara umum, mitigasi bencana diartikan sebagai sebuah upaya perencanaan yang tepat untuk meminimalisir dampak negatif bencana terhadap manusia. Mitigasi bencana merupakan salah satu dari kegiatan manajemen bencana, yang meliputi: (1) kegiatan prabencana, yakni kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini; (2) kegiatan saat terjadi bencana, meliputi kegiatan tanggap darurat, kegiatan SAR (*search and rescue*), bantuan darurat, dan pengungsian, serta (3)

kegiatan pascabencana yang mencakup kegiatan pemilihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi (UU No 24 Tahun 2007).

Mitigasi bencana, bukan sekedar persiapan dan respons yang cepat dalam tanggap darurat, baik dalam pra-bencana, sedang dan pasca-bencana. Bukan pula penelitian- penelitian kebencanaan yang semakin modern dan mutakhir atau ketersediaan alat-alat canggih dalam penanganannya, melainkan bagaimana kita mampu empati atau peka terhadap apa yang sudah nenek moyang lakukan dalam menjaga kelangsungan hidup kita dari masa ke masa, dari berbagai ancaman bencana selama beratus bahkan beribu abad lamanya. Tidak mungkin mereka tidak melakukan upaya seperti apa yang dilakukan manusia hari ini, untuk mengupayakan generasinya terus berlanjut (Samson et al., 2021).

Mengenali jati diri adalah kuncinya, bagaimana kita bisa mengetahui dan respect terhadap apa yang sudah dikerjakan para nenek moyang. Perlu perspektif lain dalam kegiatan mitigasi bencana ini. 1) Pengetahuan lokal tentang mitigasi bencana yang diwariskan nenek moyang, sepatutnya kita dayagunakan di tanah air kita sendiri. Karena adat akan lebih tahun kampungnya, dibanding pihak lain yang datang selewat. 2) Ketaatan berlandaskan Adat, Agama dan Negara sepatutnya di wujudkan dengan Tindakan nyata. Bukankah pepatah bilang “dimana bumi dipijak disana langit dijunjung” dan orang Sunda bilang “bumi boga ciri désa boga cara”. Cara adat dalam mitigasi bencana tidak perlu lagi diragukan. Bukankah keharmonisan manusia dengan semesta alam dicontohkan leluhur kita.

Ketiga, Masyarakat lokal sudah berdampingan dengan alam sekitar sejak lama sehingga berdasarkan dengan pengalaman yang lalu lalu masyarakat lokal bisah mengetahui bencana apa yang dominan berpotensi terjadi, kemudian masyarakat juga mengetahui adanya indikasi ataupun tanda-tanda akan berpotensinya bencana, di antaranya ialah ketika air laut tiba-tiba surut, curah hujan yang tinggi, awan mendung dan pergerakan hewan yang tidak wajar.

B. Saran

Dari uraian kesimpulan di atas diketahui bahwa mitigasi bencana berbasis pengetahuan lokal masyarakat di Kabupaten Majene belum terimplementasi secara optimal. Oleh karena itu penulis memberikan sedikit saran agar kedepannya kekurangan-kekurangan yang ada dapat segera ditindak lanjuti:

1. Untuk memaksimalkan antisipasi komunitas dalam masyarakat, maka diharapkan semua *stacholder* yang terkait dapat membangun komunikasi yang baik serta mengupayakan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat.
2. Untuk lebih memperkuat sumber daya dalam mitigasi bencana maka perlu adanya perluasan pengetahuan lokal kepada masyarakat serta kooperatif dari berbagai eleme yang baik sebagai upaya pengembangan sumber daya dalam mitigasi bencana.

3. Diharapkan *Stacholder*, pemangku adat serta tokoh masyarakat dapat menerapkan dan memberikan edukasi terkait mitigasi bencana dan pengembangan pengetahuan lokal kepada masyarakat sebagai wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat.



DAFTAR PUSTAKA

- Coburn, A. W., Spence, R. J. S., & Pomonis, A. (1994). Mitigasi Bencana. In *Disaster Management Training Program* (2nd ed.). <http://rovicky.files.wordpress.com/2009/10/mitigasi-bencana.pdf>
- Dewi, E. L. (2014). *Mitigasi Bencana banjir di Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*.
- Dian Agustina, Sunandi, E., & Nugroho, S. (2020). Pendampingan Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Pengetahuan Lokal pada Masyarakat Rentan Bencana di Kabupaten Mukomuko Bengkulu. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 87–99. <https://doi.org/10.29062/engagement.v4i1.102>
- Djauhari, N. (2014). *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi* (1st ed.). Deepublis. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=4iNIDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT12&dq=buku++mitigasi+bencana+&ots=6bEWleLEiD&sig=tCJVZi066m814n4y-U6WuHt-hW4&redir_esc=y#v=onepage&q=buku+mitigasi+bencana&f=false
- Erita, Mahendra, D., & MRL.Batu, A. (2019). *Manajemen Gawat Darurat dan Bencana* (1st ed.). Universitas Kristen Indonesia.
- Hartono, D., Apriyadi, K. R., Winugroho, T., Aprilyanto, Sumantri, S. H., Wilopo, & Surya, I. H. (2021). Analisis Sejarah, Dampak, Dan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Sulawesi Barat. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(2), 218–224. <https://doi.org/10.33369/pendipa.5.2.218-224>
- Nusantoro, A. (2020). Analisis Mitigasi Bencana Tanah Longsor Berbasis Kearifan Lokal Di Purworejo. *The 11th University Research Colloquium 2020 Universitas Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 2, 18–26.
- Rahman, A., Nurmalahayati, & Mazaruddin, M. (2020). *Book Series Manajemen Bencana Pengetahuan dan Praktik Lokal untuk Pengurangan Risiko Bencana: Konsep dan Aplikasi* (2nd ed.). Syiah Kuala University Press.
- Samson, C., Erwina, W., & Lusiana, E. (2021). Pengetahuan Lokal dan Strategi Lokal Sunda dalam Hadapi Bencana. *Informatio: Journal of Library and Information Science*, 1(2), 181–194.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (23rd ed.). Alfabeta.
- Suparmini, Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2014). Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Badui. *Pendidikan Penelitian Humaniora*, 19(1).
- Susilo, K. R. D., & Arrozy, A. (2020). Pengetahuan Lokal sebagai Reaksi

Komunitas dalam Manajemen Bencana (Studi Etnografi Warga Brau, Batu, Indonesia). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 08(03), 97–109. <https://doi.org/10.22500/8201931530>

Suwarno. (2019). *Mitigasi Bencana* (Wakhudin (ed.); 1st ed.). LEKKAS Bandung. http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi_Bencana.html

Wiguna, S., Syauqi, Shalih, O., Adi, A. W., Ahmad, R., Septian, R. T., Widiastomo, Y., Putra, A. S., Karimah, R., Eveline, F., Alfian, A., Abdul, H., Bagaskoro, Y., Dewi, A. N., & Rahmawati, I. (2020). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020. In *BNPB*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://inarisk.bnppb.go.id/pdf/BUKU_IRBI_2020_KP.pdf



L

A

M

P

I

R

A

N



Ir. Basri Ibrahim (Ketua Forum Studi Pengembangan Ada'Tuho)



Muhammad Arif (Camat Ulumanda)







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866572, 881593, Fax. (0411) No. 1388

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Gunawan
NIM : 105641104217
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

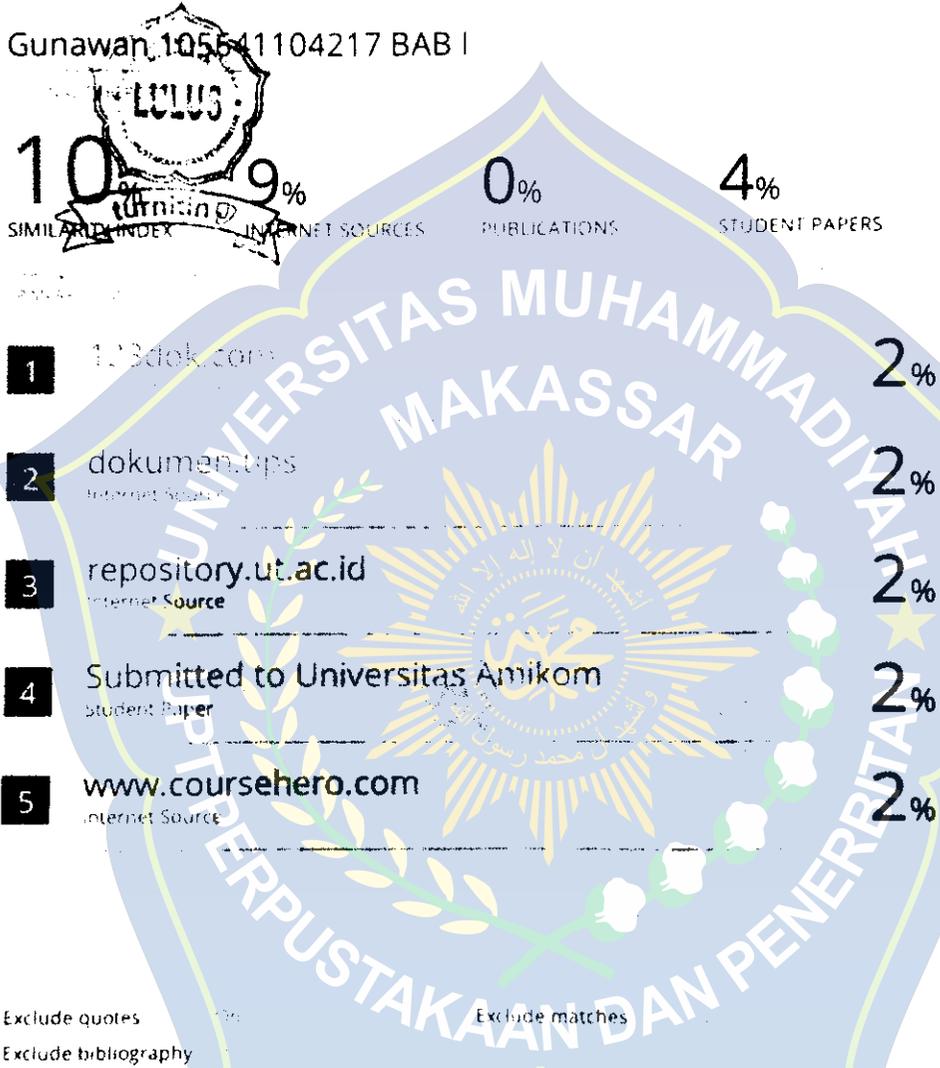
Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sepertinya.

Makassar, 16 Juli 2022
Mengetahui

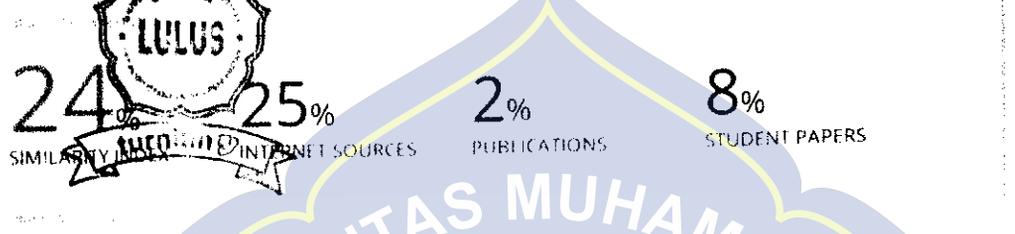
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Muhammad H. Hum, M.I.P
NIM. 964 591

Gunawan,105541104217 BAB I

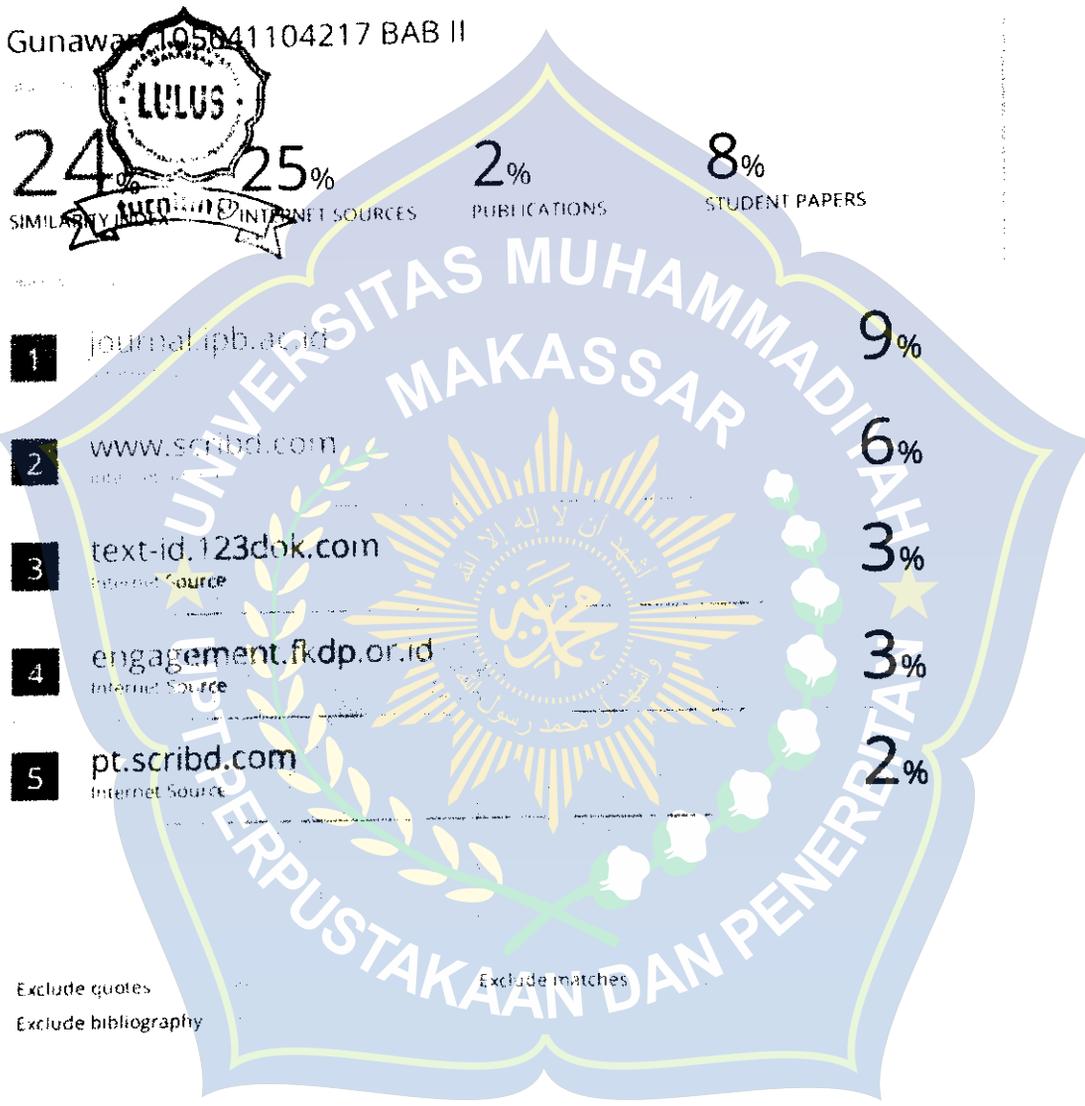


Gunawan, 105041104217 BAB II



Rank	Source	Percentage
1	journal.ipb.ac.id	9%
2	www.scribd.com	6%
3	text-id.123dok.com Internet Source	3%
4	engagement.fkdp.or.id Internet Source	3%
5	pt.scribd.com Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude matches
 Exclude bibliography

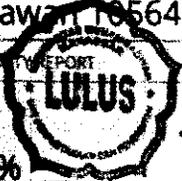


Gunawan 105641104217 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 eprints.uny.ac.id
Internet Source

3%

2 Submitted to Universitas Bangka Belitung
Student Paper

3%

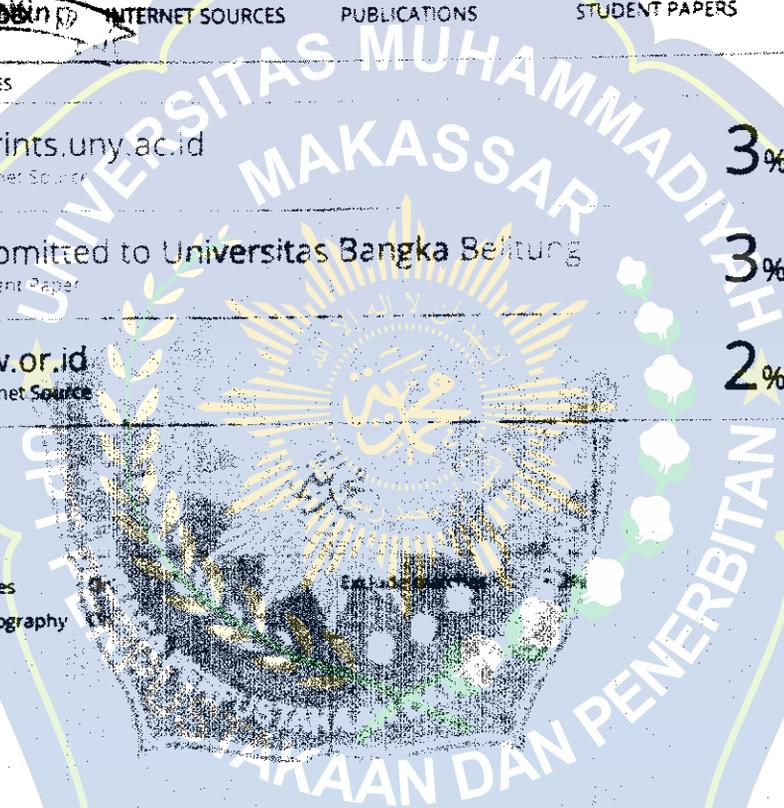
3 dfw.or.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude references





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(OPN/PSP)

By: Amanah Wewang No 12 Tahun 2012/191 Majene Selatan



IZIN PENELITIAN

Nomor 0034/P/OPN-P/13P/MMJ/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewenangan Penandatanganan Penzinan dan Non Penzinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/031/P/2022 Tanggal 17 Januari 2022 maka pada konsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** kepada:

Nama	: GUNAWAN
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 105641104217
Program Study/Jurusan	: S1. ILMU PEMERINTAHAN
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Seppong Desa Ukuranda Kec. Ukuranda Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul "**MITIGASI BENCANA BERBASIS PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJENE**" dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar foto copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 21-01-2022
Kepala Dinas



M. DJAZULI, M. SP, MH
Pembina Utama Muda
19690703 199803 1 007

